

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN MASYARAKAT KOTA JANTHO
KABUPATEN ACEH BESAR**

**(Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar
Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

**NOBILA SAUMY ARGHNIYA
NIM. 180802012**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2021/2022**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nobila Saumy Arghniya
NIM : 180802012
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Kota Jantho, 30 November 2000
Alamat : Jln. Seulawah Agam No.206, Desa.
Bukit Meusara, Kec. Kota Jantho, Kab.
Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemsilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022
Yang Menyatakan




Nobila Saumy Arghniya
NIM. 180802012

PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN MASYARAKAT KOTA JANTHO
KABUPATEN ACEH BESAR**

**(Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar
Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

Nobila Saumy Arghniya

Nim. 180802012

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si
NIP. 196110051982031007

Pembimbing II



Afrizal, M.IP
NIP. 199104182020121003

PENGESAHAN SIDANG
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN MASYARAKAT KOTA JANTHO
KABUPATEN ACEH BESAR
(Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar
Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

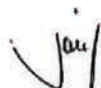
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022 M
27 Zulhijah 1443 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si.
NIP. 196110051982031007


Afrijal, M.IP.
NIP. 199104182020121003

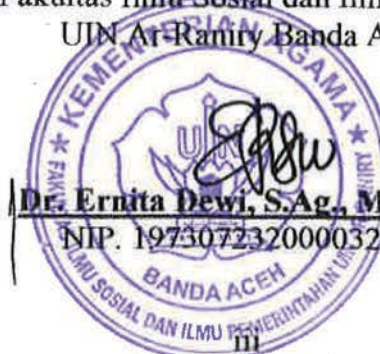
Penguji I,

Penguji II,


Muhammad Thalal, L.c., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011


Mansari, SHL., MH.
NIDN. 1320089101

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.HumA
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Secara umum produksi padi Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan dari 269.470 pada tahun 2019 menjadi 230.875 ton pada tahun 2020 dengan luas tanam 34.244 hektar, luas panen 38.085 hektar dan luas lahan baku sawah 25.692 hektar. Dengan hasil produksi padi tersebut, untuk kebutuhan konsumsi padi masyarakat Kabupaten Aceh Besar sebesar 56,775 ton dengan jumlah penduduk Aceh Besar yang mencapai 405,535 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kemungkinan terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh besar, salah satunya Kecamatan Kota Jantho. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan terhadap kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dan untuk mengetahui dan menganalisis ketersediaan pangan untuk masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan analisis dokumen serta teknik analisis data menggunakan condensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan terhadap kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar adalah memberikan fasilitas berupa pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), modal awal dan pengadaan gabah. Akan tetapi salah satu Gampong Kota Jantho masih belum menunjukkan perubahan ke arah keluarnya dari status kerawanan pangan. Masyarakat Kota Jantho juga hanya dapat memproduksi padi sekali dalam setahun, hal ini menyebabkan kurangnya ketersediaan pangan masyarakat. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat meningkatkan upaya terhadap penanganan kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dalam menurunkan atau mengeluarkan status kerawanan pangan Kota Jantho menjadi wilayah ketahanan pangan dan kemandirian pangan.

Kata Kunci : *Peran, Pemerintah Daerah, Pangan dan Kota Jantho.*

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah serta rezeki yang Allah berikan tak lupa pula shalawat dan salam kita hantarkan dengan segala kerendahan hati ke atas pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan beserta keluarga dan para sahabatnya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar”.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada Program Strata-1 (S-1) di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat Allah SWT yang telah memudahkan peneliti serta bimbingan, bantuan, nasehat dan kerja sama dari berbagai pihak, sehingga peneliti dapat mengatasi kendala-kendala tersebut.

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, Ak., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Eka Januar, M.Soc.Sc selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Said Amirulkamar, MM, M.Si. selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Afirizal, S.Ip., M.IP selaku pembimbing kedua yang telah mengarahkan serta memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan, beserta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah ikut membantu dalam menyiapkan segala keperluan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua yang sangat peneliti cintai dan sayangi, Ayahanda Supardi yang selalu memberikan masukan dan selalu mendampingi peneliti hingga saat ini dan ibunda Erni yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti, terima kasih atas seluruh cinta dan kasih sayang yang ayahanda dan ibunda berikan kepada peneliti.
8. Abang-abang peneliti Dimas Ferdy Furqan dan Adjie Aulia Rahman dan juga seluruh keluarga besar peneliti yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat-sahabat peneliti Finni Afdilla, Indah Tarina Rizki Nuzul Fitri, Vina Anjely, Misriyanti, Lusi Maulida, dan Wilda Hanum yang telah memberikan motivasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2018 Ilmu Administrasi Negara yang telah bekerja sama untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dalam penulisan ataupun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, sehingga peneliti membutuhkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pada masa depan. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Semoga Allah membalas segala amal kebaikan semua pihak yang telah mendukung, membantu dan menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terima kasih.

Banda Aceh, 19 Juli 2022
Penulis,

Nobila Saumy Arghniya
NIM. 180802012



DAFTAR ISI

PERTANYAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Penjelasan Istilah.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik	12
2.3 Teori Peran.....	16
2.4 Teori Pangan	20
2.5 Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.4 Sumber Data.....	32
3.5 Informan Penelitian.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Analisis Data.....	35
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian	39
4.1.2 Hasil Pengumpulan Data.....	48
4.2 Pembahasan Penelitian.....	67
4.2.1 Ketersediaan pangan untuk masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.....	67
4.2.2 Upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan terhadap kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar	71

BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Program Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar	3
Tabel 2.1 Indikator Aspek Ketahanan Pangan	24
Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Upaya Pemerintah Daerah	30
Tabel 3.2 Dimensi dan Indikator Ketersediaan Pangan	30
Tabel 3.3 Informan Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Per Jemis Kelamin	40
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Peringkat Pendidikan	40
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Per Golongan	41
Tabel 4.4 Faktor Kerawanan Pangan dan Upaya Pemerintah Daerah	53
Tabel 4.5 Gampong Yang Mempunyai Lumbung Pangan Masyarakat.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor Dinas pangan Kabupaten Aceh Besar 39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing	82
Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian	83
Lampiran 3. Foto Dokumentasi.....	84
Lampiran 4. Bukti Penerimaan Bantuan Dari Pemerintah.....	87
Lampiran 5. Draf Wawancara.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, dengan luas wilayah Kabupaten Aceh Besar 2.903,5 km² yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 604 Desa/Gampong dengan total penduduk sebanyak 405.535 jiwa dan luas lahan sektor pertanian 29.000 hektar. Secara astronomis Kabupaten ini terletak pada garis 5,05° -5,57° Lintang Utara dan 94,99°-95,93° Bujur Timur. Kabupaten Aceh Besar di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Secara klimatologis, “Kabupaten Aceh Besar memiliki pola curah hujan yaitu daerah basah memiliki curah hujan lebih dari 1.650 mm per tahun. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir”.¹⁾

Berdasarkan data agriculture Kabupaten Aceh Besar tahun 2021 menunjukkan sebagai berikut :

Secara umum produksi padi Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan dari 269.470 pada tahun 2019 menjadi 230.875 ton pada tahun 2020 dengan luas tanam 34.244 hektar, luas panen 38.085 hektar dan luas lahan baku sawah 25.692 hektar. Dengan hasil produksi padi tersebut, untuk kebutuhan konsumsi padi masyarakat Kabupaten Aceh Besar sebesar 56,775 ton dengan jumlah penduduk Aceh Besar yang mencapai 405,535 jiwa. Selain

¹⁾ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar, *Profil Pembangunan Aceh Besar 2021*, (BAPPEDA dan BPS: 2021) Hal 3.

kebutuhan konsumsi, kebutuhan untuk buffer stock (cadangan pangan) yang digunakan untuk korban bencana sebesar 14,859,48 ton, sedangkan kebutuhan benih 1,603,96 ton, jadi total keseluruhan kebutuhan padi Kabupaten Aceh Besar mencapai 73,238,34 ton pertahun.²⁾

Namun demikian kondisi ini menunjukkan bahwa masih adanya kemungkinan terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh besar, salah satunya Kecamatan Kota Jantho, yang terdiri dari 13 (tiga Belas) Gampong dengan jumlah penduduk 9,355 jiwa, sebagaimana data Dinas Pangan tahun 2021 menunjukkan :

Gampong yang merupakan daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan ada 6 Gampong yaitu Gampong Suka Tani, Bueng, Jalin, Data Cut, Teurebeh, Jantho Baru dan 7 Gampong yang tidak rawan pangan dan berkecukupan untuk memenuhi pangan dalam kehidupannya yaitu Awek, Cucum, Jantho makmur, Bukit Meusara, Jantho, Weu dan Barueh, diantara gampong-gampong tersebut ada 2 gampong yang mempunyai lembaga lumbung pangan masyarakat yaitu Jantho Baru dan Awek. Kerawanan pangan yang terjadi di gampong tersebut dikarekan adanya faktor kemiskinan dan faktor topografi wilayah.³⁾

Dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk di suatu daerah Kabupaten Aceh Besar, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintah. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

²⁾ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2021*, (BPS: 2021) Hal.212.

³⁾ Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar

Seirama dengan perjalanan waktu sebagaimana Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 33 Ayat 2 mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal”.⁴⁾ Untuk menindak lanjuti Undang-undang tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar ditugaskan kepada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar yang merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan kabupaten di bidang pangan, hal ini merujuk pada Peraturan Bupati Aceh Besar Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar di atas, pemerintah telah melakukan beberapa strategi untuk mengatasi kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho sesuai dengan prosedur kebijakan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Pangan , strategi-strategi/program tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Program Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar

No	Tahun	Program	Keterangan
1	2018	Pengentasan kemiskinan dengan melakukan pembinaan kelompok tani	Gampong Jalin

⁴⁾ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

2	2019	Penguatan pengembangan cadangan pangan Daerah serta pengisian lumbung pangan	Gampong Awek
3	2020	Program Gerakan Aceh Mandiri Pangan melalui pemanfaatan dana bantuan hibah sarana produksi pemanfaatan pekarangan	Gampong Teureubeh
4	2021	Penguatan lumbung pangan masyarakat dengan menyediakan sarana gudang lumbung pangan masyarakat	Gampong Jantho Baru

Sumber : Dinas Pangan Aceh Besar 2021

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar telah melakukan program pengentasan kemiskinan dengan melakukan pembinaan kelompok tani pada tahun 2018 di gampong Jalin. Pada tahun 2019 melakukan penguatan pengembangan cadangan pangan Daerah serta pengisian padi di lumbung pangan masyarakat di gampong Awek sebanyak 2000 kilogram gabah/padi. Selanjutnya pada tahun 2020 Program Gerakan Aceh Mandiri Pangan melalui pemanfaatan dana bantuan hibah sarana produksi pemanfaatan pekarangan di berikan kepada kelompok wanita tani (KWT) di gampong Teureubeh sebesar 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Pada tahun 2021 Dinas Pangan Kabupaten Aceh besar melakukan penguatan lumbung pangan masyarakat dengan menyediakan sarana gudang lumbung pangan masyarakat di gampong Jantho Baru berupa pembangunan lumbung pangan masyarakat kapasitas 60 ton serta pengisian gabah/padi sebanyak 3000 kilogram.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho, akan

tetapi berdasarkan pada data peta ketahanan dan kerentanan pangan 2021 “Gampong-gampong tersebut masih belum menunjukkan perubahan dan masih tergolong gampong yang rentan terhadap kerawanan pangan”.⁵⁾

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini berkenaan dengan penanganan kerawanan pangan untuk kebutuhan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Studi Implementasi Kebijakan berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan identifikasi sebagai berikut :

1. Rendahnya ketersediaan pangan untuk masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
2. Rendahnya upaya pemerintah daerah yang dilakukan terhadap kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut :

⁵⁾ Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar

1. Bagaimana ketersediaan pangan untuk masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan terhadap kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketersediaan pangan untuk masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan terhadap kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini berguna sebagai rekomendasi dan bahan masukan bagi pemerintah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam penanganan kerawanan pangan masyarakat.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai instrument dalam memperluas ilmu pengetahuan dan referensi yang hanya

berisi paparan nyata di lapangan bersangkutan dengan peran Pemerintah Daerah dalam penanganan kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.

1.6 Penjelasan Istilah

Adanya beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar” maka dari itu penulis menjelaskan definisi istilah tersebut, yaitu :

1. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dijalankan atau dimainkan.⁶⁾
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.⁷⁾
3. Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menangani atau penggarapan.⁸⁾
4. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif.

Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan

⁶⁾ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2014).

⁷⁾ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 (3).

⁸⁾ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), Hal. 1620.

dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.⁹⁾

5. Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa gagal panen. Lumbung pangan adalah kelembangan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa atau kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat disuatu wilayah.¹⁰⁾



⁹⁾ Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 Tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Pasal 1 (4).

¹⁰⁾ Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar” sebagai berikut :

1. Reka Yolanda (2021), Skripsi, Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, *“Peran Dinas Pertanian Dan Pangan Dalam Pengelolaan Stok Pangan Di Kabupaten Pidie”*, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie dan Bagaimana tantangan dan hambatan pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie dan untuk mengetahui tantangan dan hambatan pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie dikarenakan peran Dinas Pertanian dan pangan belum efektif dalam melakukan salah satu indikator peran dan lemahnya

penyesaian tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie.

2. Nurafina (2020), Skripsi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (NTB), "*Evaluasi Program Distribusi Dan Cadangan Pangan Di Kota Mataram (Studi di Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram)*", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Evaluasi Program Distribusi dan Cadangan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat program Evaluasi dan Cadangan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program distribusi dan cadangan pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat program evaluasi dan cadangan pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dalam membangun ketahanan pangan cukup berperan aktif dalam memantau, menstabilkan dan mewujudkan sistem distribusi pangan melalui cara yang efektif, efisien serta memfasilitasi setiap program distribusi dan cadangan pangan dalam pengentasan wilayah rawan pangan. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota

Mataram adalah kurangnya staf dibidang distribusi cadangan pangan dalam memantau pasar, komunikasi, stabilitas harga pangan dan kualitas barang dibawah standar.

3. Hening Febriana (2019), Skripsi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultas Ageng Tirtayasa, "*Strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Tangerang*", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tangerang, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang menggunakan matrik analisis SWOT, seperti adanya pelaksanaan program lumbungan padi masyarakat, KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), pengawasan keamanan pangan segar dan lainnya, walaupun pelaksanaan yang dilakukan memang masih belum berjalan secara optimal dikarenakan masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan progra-program tersebut. Strategi ini dilaksanakan sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Tangerang.

2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan lanjutan dari tahap formulasi kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi sering disebut sebagai suatu proses rangkaian kegiatan yang akan ditindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijakan tersebut telah ditetapkan atas pengambilan keputusan. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk disalurkan untuk mencapai sasaran. Dalam pertumbuhan berbagai teori memiliki pakar masing-masing yang lebih awal mencurahkan perhatian dan gagasan terhadap masalah implementasi, oleh karena itu teori implementasi kebijakan publik secara umum memiliki tiga tahapan utama sebagaimana Wibawa menyebutkan bahwa “proses yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi”.¹¹⁾

Implementasi pada kamus Webster’s dalam Wahab “Pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa “*to implement*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide means for carrying out*” (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) “*to give racial effect to*” (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.¹²⁾ Tahapan

¹¹⁾ Wibawa, Samodra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014) Hal. 15.

¹²⁾ Rahmi, Hasanatul & Jumiati, Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat), *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi*

implementasi kebijakan ini dapat berpengaruh terhadap masyarakat baik itu berdampak positif maupun negatif.

Teori implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan. Kebijakan meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan publik sebagaimana Wibawa menyebutkan bahwa :

Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.¹³⁾

Selanjutnya dalam buku *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi* oleh Kamal Alamsyah, Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai berikut :

Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.¹⁴⁾

Publik (JMIAP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Volume 2 (1) (2020), Hal.14.

¹³⁾ Wibawa, Samodra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014) Hal.12.

¹⁴⁾ Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Media Citra Mandiri Press 2016), Hal. 66.

Adapun pengertian implementasi lain dapat dilihat dalam beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut :

Mulyadi mengatakan pendapat mengenai implementasi sebagai berikut : Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.¹⁵⁾

Menurut Edward menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang dipengaruhinya. Apabila suatu kebijakan tersebut tidak tepat untuk mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan tersebut mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu telah diimplementasikan dengan sangat baik, bahkan kebijakan yang

¹⁵⁾ Mulyadi, D, *Perilaku Organisasi dan Kepimpinan Pelayanan*, (Bandung: Alfabeta 2015) Hal.12.

diimplementasikan dengan kurang baik, hal ini cenderung akan mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan.¹⁶⁾

Ada beberapa model implementasi kebijakan publik, yaitu sebagai berikut :

1. Model Edward

Edward mengemukakan dua pertanyaan pokok, yaitu hal-hal apa saja yang merupakan prasyarat bagi berhasilnya suatu implementasi kebijakan dan apa saja yang merupakan penghambat utama terhadap implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan tersebut, Edward merumuskan 4 faktor yang merupakan syarat-syarat penting untuk mengkaji dan meneliti apakah berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Komitmen dan Struktur birokrasi yang mana keempat faktor tersebut merupakan sebuah proses yang dinamik, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan lainnya.

2. Model Van Meter dan Van Horn

Model proses implementasi ini menggambarkan beberapa faktor yang membentuk mata rantai antara kebijakan yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi interorganisasi dan kegiatan implementasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta sikap para pelaksana.

3. Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemtasi, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan (*tractability of the problem*), kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses implementasi (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel diluar kebijakan / variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).¹⁷⁾

Dan menurut Purwanto dalam jurnal Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat), ada beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.

¹⁶⁾ Dr.Syahrudin, S.E.,MsI., *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: NusaMedia, 2019). Hal. 27.

¹⁷⁾ Dr. Alexander Phuk Tjilen. S.E., M.Si, *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: NusaMedia, 2019), Hal. 30.

2. Kecukupan *input* kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.¹⁸⁾

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut bahwa implementasi merupakan suatu proses tahapan lanjutan kebijakan yang sebelumnya diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi setelah melalui tahapan formulasi, tahapan implementasi ini guna untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.3 Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dijalankan atau dimainkan.¹⁹⁾ Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan

¹⁸⁾ Syahida, Agung, Bayu, Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat), *Jurnal Umrah* 1(1), (2014) Hal 13.

¹⁹⁾ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2014).

peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”.²⁰⁾

Dalam pemahaman teori peran dan pemahaman peranan sebenarnya sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Pandangan ini sangat tergantung sisi yang mana seharusnya dibidik dan mengenai seharusnya bertindak dalam situasi tertentu sebenarnya hanyalah sebuah persepsi peran (*role perception*) seseorang dalam melihat pada sebuah *iterprestasi* atas apa yang diyakini mengenai dengan yang seharusnya baik berorientasi pada peranan seseorang, berperilaku, tindak tanduk maupun bersikap pada situasi dan waktu tertentu.

Secara sosiologi dan antropologi dalam membicarakan peran menurut Soerjono Soekanto menyebutkan sebagai berikut :

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.²¹⁾

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

²⁰⁾ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm.86.

²¹⁾ Soejono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Hal.24.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²²⁾

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah “Memberi arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan, dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat”.²³⁾

Selanjutnya dalam Suhardono menyebutkan sebagai berikut : Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawa oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (role performance).²⁴⁾

Ada 3 (tiga) peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat menurut Yusuf dalam skripsi peran pemerintah dalam pemberdayaan petani rumput laut oleh Raif yaitu:

1. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat

²²⁾ Soejono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Hal 269.

²³⁾ Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) Hal. 160.

²⁴⁾ Sohardono, Edi, *Teori Peran*, (Jakarta: PT. Gramedia 2012) Hal. 237.

sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.²⁵⁾

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki kekuasaan atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas apabila dihubungkan dengan peran Pemerintah Daerah dalam penanganan kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, maka peran tersebut tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu seseorang, melainkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 pasal 13 tentang pangan mengamanatkan bahwa “Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok

²⁵⁾ Raif, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut*, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019 Hal 13, Skripsi.

Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat”.²⁶⁾

2.4 Teori Pangan

Dalam teori pangan banyak ditemui fenomena kehidupan masyarakat tani yang tidak berhasil dalam penanaman palawija sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi sehingga pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk berlangsung hidup manusia dan sangat esensial dalam kehidupan manusia. Demikian Peraturan Bupati Aceh Besar Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 pasal 1 (6) tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Aceh Besar.mengamanatkan bahwa :

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.²⁷⁾

Adapun juga beberapa definisi pangan dari berbagai pendapat lain sebagaimana menurut Almatsier dalam buku Ekologi Pangan dan Gizi menyebutkan bahwa “Pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap saat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, aman, bergizi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat”.²⁸⁾

²⁶⁾ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pasal 13.

²⁷⁾ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar*, Pasal 1(6).

²⁸⁾ Rahayu, Atikah, Fahrini Yulidasari & Andini Octaviana Putri, *Ekologi Pangan dan Gizi*, (Yogyakarta: CV Mine, 2019), Hal.2.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2015 menyatakan sebagai berikut :

Pangan adalah segala sesuatu mulai dari mata air alami pertanian, peternakan, hutan, perikanan, peternakan, air dan barang, jika ditangani, yang ditetapkan sebagai makanan atau minuman untuk pemanfaatan manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan mentah pangan, dan lain-lain bahan yang digunakan dalam perencanaan, persiapan, dan produksi makanan atau minuman.²⁹⁾

Prabowo juga mengamanatkan bahwa “Pangan memiliki nilai-nilai yang penting karena jika terjadi peningkatan harga pangan akan berdampak pada penurunan konsumsi protein dan kalori”.³⁰⁾

Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui proses kedaulatan pangan dan penganekaragaman pangan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 pasal 41 tentang Pangan mengamanatkan bahwa “Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, mengembangkan usaha Pangan dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.³¹⁾

Pemenuhan kebutuhan pangan sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk

²⁹⁾ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 *Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi*, Pasal 1(2).

³⁰⁾ Prabowo, Eko, *Konsep & Aplikasi Keperawatan Jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika 2014). Hal.19.

³¹⁾ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 *Tentang Pangan*, pasal 41.

menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Berikut definisi ketahanan pangan menurut Hanani dalam Purwaningsih:

Adanya ketahanan pangan maka diharapkan Masyarakat dapat mewujudkan kemandirian pangan, dimana arti kemandirian pangan itu sendiri Menurut UU RI No. 18 Tahun 2012 adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.³²⁾

Strategi yang diterapkan dalam rangka keberhasilan pembangunan ketahanan pangan menurut Hanafie adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat;
- 2) Pengembangan sistem dan usaha agrobisnis;
- 3) Mewujudkan kebersamaan antara masyarakat sebagai pelakudan pemerintah sebagai fasilitator;
- 4) Menumbuhkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, mengelola produksi pangan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, dan mampu menyalurkan kelebihan produksi pangan untuk memperoleh harga yang wajar. Kesadaran masyarakat akan pentingnya penganeragaman pangan dengan mutu pangan yang dikonsumsi harus semakin meningkat dalam mewujudkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga.³³⁾

Ada beberapa hal penting dalam mengatasi permasalahan pangan di Indonesia menurut Purwaningsih yaitu sebagai berikut :

1. Ketersediaan pangan Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjangkau mutunya) bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan

³²⁾ Purwaningsih, D, Analisis Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah 2009, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Jurnal Ilmiah FE UNS Surakarta*, Vol. 11, Nomor.1, 2011, Hal.5.

³³⁾ Hanafie, R. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta : Penerbit Andi 2010), Hal. 275.

hidupnya. Penyediaan pangan dalam negeri harus diupayakan melalui produksi dalam negeri dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk.

2. Kemandirian pangan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya merupakan indikator penting yang harus diperhatikan, karena negara yang berdaulat penuh adalah yang tidak tergantung (dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sebagainya) pada negara lain.
3. Keterjangkauan pangan atau aksesibilitas masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan sangat ditentukan oleh daya beli, dan daya beli ini ditentukan oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan.
4. Konsumsi pangan berkaitan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Tingkat dan pola konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat.³⁴⁾

Perkembangan ini menunjukkan daerah yang merupakan lumbung pangan dan ada pula yang daerah kerawanan pangan. Kerawanan pangan adalah “Kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya”.³⁵⁾

Badan Ketahanan Pangan mengatakan kerawanan pangan terbagi menjadi dua yaitu kerawanan transien dan kerawanan kronis, berikut adalah penjelasannya :

Kerawanan transien merupakan kerawanan pangan sementara terjadi ketika ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang biasanya dikaitkan dengan guncangan atau tekanan khusus seperti kekeringan, banjir atau kerusakan sipil. Sedangkan kerawanan kronis merupakan kerawanan yang terjadi ketika rumah

³⁴⁾ Purwaningsih, Y. E, Ketahanan Pangan : Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol.9, No.1, 2008, Hal 3.

³⁵⁾ Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan, *Panduan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat*, (Jakarta, 2018), Hal.3.

tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan pada waktu normal karena mereka tidak memiliki cukup tanah pendapatan atau aset produktif atau mengalami rasio ketergantungan yang tinggi, sakit kronis atau hambatan sosial.³⁶⁾

Perubahan faktor tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, hal tersebut dikarekan sebagian dari penduduk miskin pendapatan mereka digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Jika terjadinya kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan kronis. Adapun indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Aspek Ketahanan Pangan

Indikator	Definisi
a. Aspek Ketersediaan Pangan	
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	Luas baku lahan sawah dibandingkan luas wilayah desa
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa
b. Aspek Akses Terhadap Pangan	
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1)Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum

³⁶⁾ Badan Ketahanan Pangan, *Bahan E-Learning Bidang Kerawanan Pangan*, (Jakarta: 2019), Hal.4.

c. Aspek Pemanfaatan Pangan	
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa

Sumber : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar 2021.

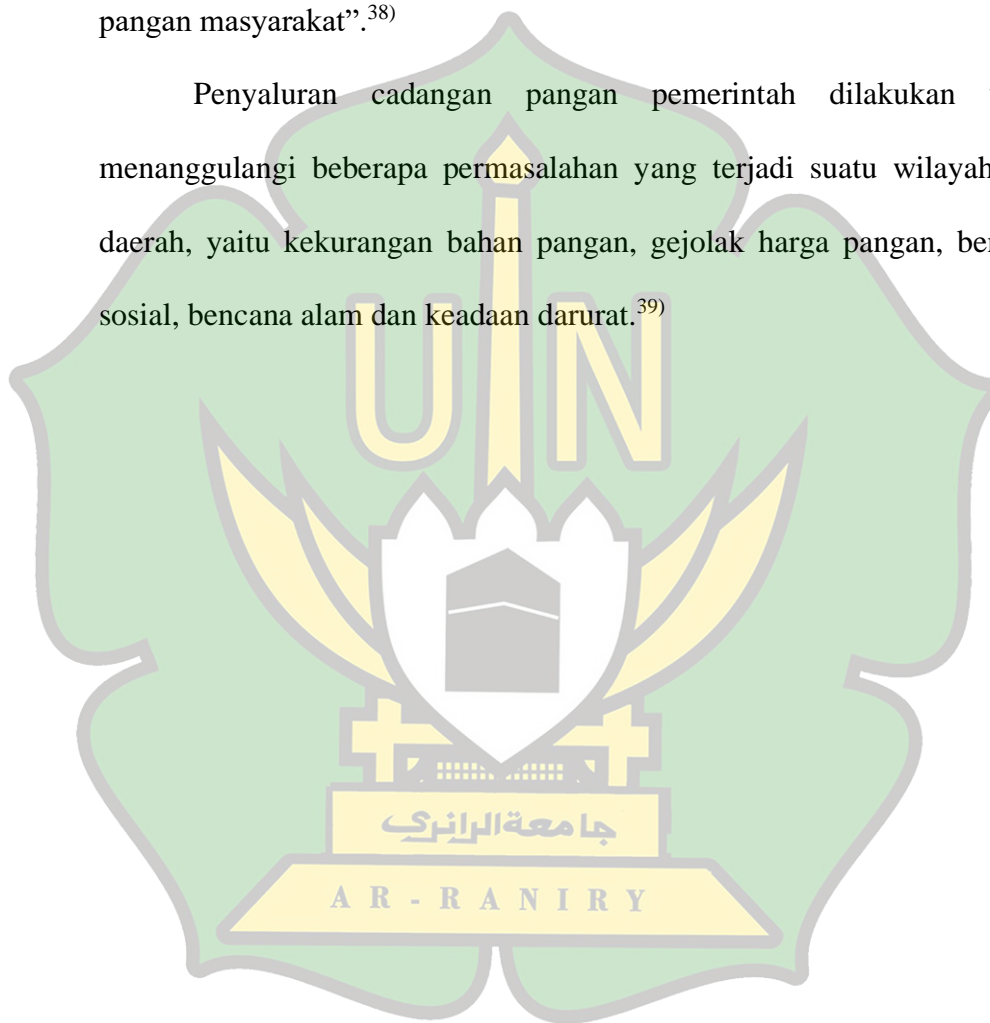
Indikator-indikator pada tabel di atas digunakan untuk mengukur seberapa rentan desa-desa tersebut terhadap kerawanan pangan. Pada dasarnya setiap desa berbeda-beda kondisi terhadap kerawanan pangan, maka dari itu desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan.

Dengan kata lain, desa prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerawanan pangan lebih besar dibandingkan desa lainnya, sehingga desa prioritas 1 memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, desa yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduk berada dalam kondisi rawan pangan, dan juga sebaliknya desa pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduk tahan pangan.

Demikian pula pertumbuhan pada daerah membutuhkan kebutuhan pangan yang cukup sehingga diperlukannya cadangan pangan. Cadangan pangan adalah “Persediaan pangan disuatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan dan untuk

menghadapi keadaan darurat (transien) ataupun kemiskinan (kronis)³⁷⁾ Cadangan pangan ada dua yaitu “Cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Dinas Pangan (pemerintah) dan cadangan pangan masyarakat yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat tani melalui lumbung pangan masyarakat”.³⁸⁾

Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi beberapa permasalahan yang terjadi suatu wilayah atau daerah, yaitu kekurangan bahan pangan, gejolak harga pangan, bencana sosial, bencana alam dan keadaan darurat.³⁹⁾

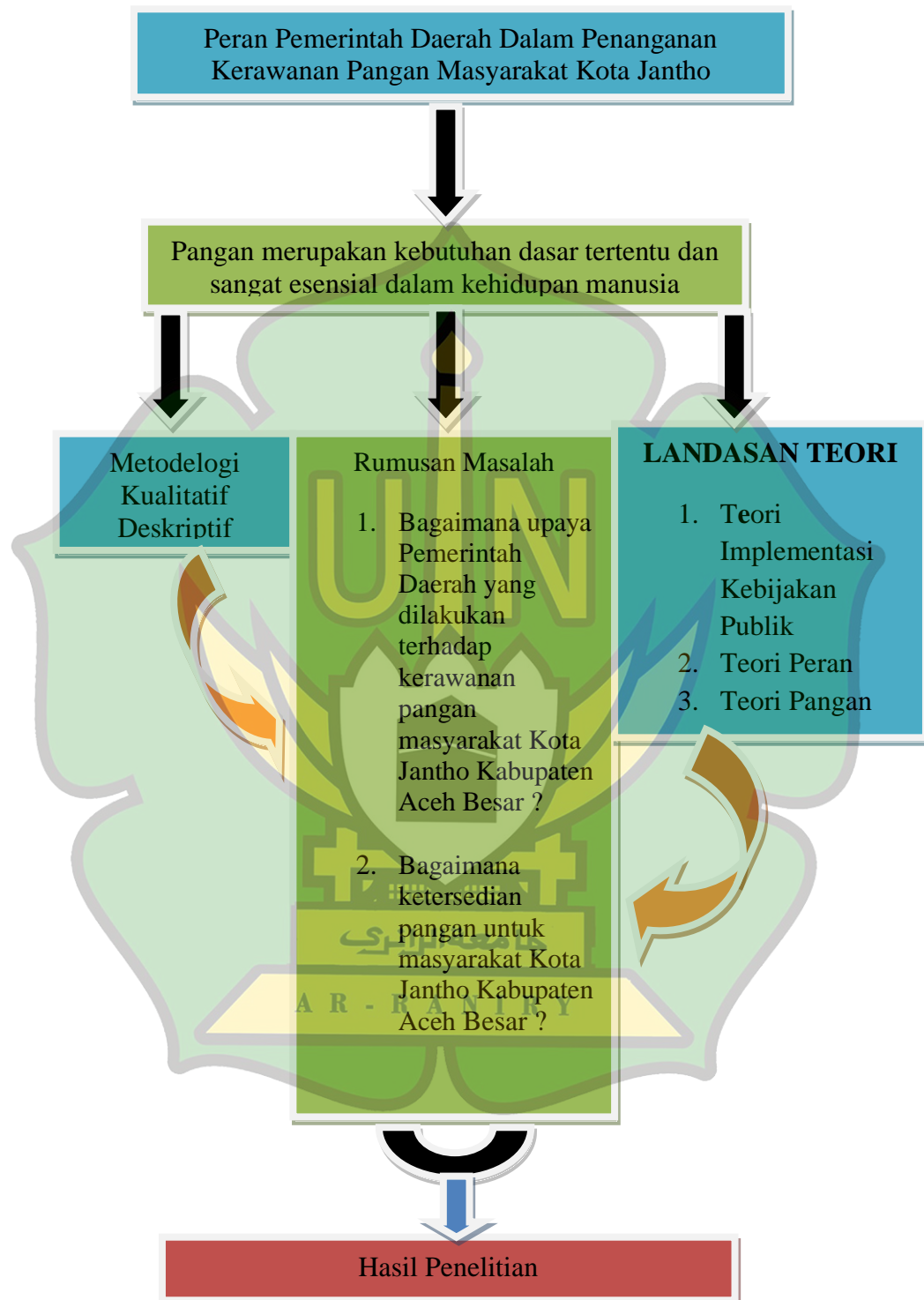


³⁷⁾ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013, *Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar*, Pasal 1 Ayat 10.

³⁸⁾ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, *Tentang Pangan*, Pasal 1 (9 & 13).

³⁹⁾ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, *Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi*, Pasal 9 Ayat 1.

2.5 Kerangka Pemikiran



Sumber Olahan Penelitian

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengumpulkan data-data fenomena yang terjadi di lapangan secara aktual dan mengamati secara seksama, kemudian peneliti menganalisis data-data tersebut. Sebagaimana pendapat Sugiyono menyebutkan bahwa “Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif ini juga sering disebut non-eksperimen, karena penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian”.⁴⁰⁾

Adapun juga pendapat lain dari Soetanyo menyebutkan bahwa :

Pendekatan kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji dan menggali kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, terutama kasuistik sifatnya, namun mendalam dan total/menyeluruh, dalam arti tak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan variable.⁴¹⁾

Adapun pendapat terhadap metode kualitatif Soetanyo menyebutkan bahwa “Metode kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, namun mendalam (*in depth*) dan total/menyeluruh (*holistic*), dalam arti tak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara

⁴⁰⁾ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2017), Hal. 107.

⁴¹⁾ Soetanyo, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Grasindo 2012). Hal 65.

konsepsional ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan variabel”.⁴²⁾

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu data yang didapat dari lapangan. Penelitian lapangan adalah “Sebuah penelitian yang sumber daya dan proses penelitiannya menggunakan kanchah atau lokasi tertentu sesuai dengan yang dipilih.”⁴³⁾

Dari berbagai pemahaman metode penelitian kualitatif yang diungkapkan para ahli semuanya berupaya untuk menyelesaikan masalah penelitian. Metode penelitian ini juga sebagai pedoman peneliti untuk mempermudah mengenali keadaan sosial dalam kehidupan masyarakat.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam setiap penelitian yang akan diteliti diperlukan fokus penelitian guna untuk mempermudah peneliti dengan adanya pemusatan terhadap objek yang akan diteliti di lapangan, sehingga peneliti tidak menyimpang, keblakblakan atau kehilangan arah dari permasalahan penelitian untuk memperoleh hasil akhir penelitian. Jadi observasi, wawancara serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah pada objek penelitian dengan adanya fokus penelitian tersebut.

Dalam penelitian kualitatif secara umum fokus penelitian sebagaimana Moleong menyebutkan sebagai berikut :

Fokus adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah

⁴²⁾ Soetanyo, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Grasindo 2012). Hal 65.

⁴³⁾ Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012) hal.56

ataupun kepustakaan lainnya. *Implikasinya*, apabila peneliti merasakan adanya masalah, seyogyanya ia mendalami kepustakaan yang relevan sebelum terjun kelapangan. Dengan jalan demikian fokus penelitian akan memenuhi kriteria untuk bidang ikuri yaitu kriteria inklusi-inklusi atau implikasi yang lain memanfaatkan paradigma.⁴⁴⁾

Dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan penanganan kerawanan pangan untuk kebutuhan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Studi Implementasi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar) fokus ini dilakukan agar mampu melakukan pemusatan diri terhadap objek penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melihat gejala dan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di lapangan, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah daerah yang dilakukan terhadap kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Upaya Pemerintah Daerah

No	Dimensi	Indikator
1	Kewilayahan	a. Persediaan Pangan b. Konsumsi Pangan
2	Pengendalian/stabilitas	a. Harga Pangan b. Keadaan Darurat

Sumber : Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 1 (10 & 18) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan.

2. Ketersediaan pangan untuk masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar

Tabel 3.2
Dimensi dan Indikator Ketersediaan Pangan

No	Dimensi	Indikator
1	Ketersediaan Pangan	a. Sumber Hayati

⁴⁴⁾ Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : RemajaRosdakarya, 2017), Hal. 97.

2	Tambahkan Pangan	b. Sumber Olahan a. Bahan Baku Pangan b. Proses Penyiapan Pangan
---	------------------	------------------------------------------------------------------------

Sumber : Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 1 (6) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Tanggal 30 Mei sampai dengan 03 Juli 2022, di Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar Jl. Laksamana Malahayati, disebabkan karena:

1. Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, sebagai salah satu institusi pemerintah yang mengemban tugas pengelolaan pangan sebagai kebutuhan masyarakat dan stok pangan secara kedaerahan dalam menjaga keutuhan ketersediaan pangan daerah dalam upaya mendukung pangan nasional;
2. Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, sebagai salah satu penyedia lumbung pangan yang disediakan dari pedesaan sampai ke tingkat daerah, sehingga dalam Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dari 13 Gampong 6 Gampong sebagai daerah yang rentan rawan pangan dan diantaranya ada 2 Gampong yang mempunyai lembaga lumbung pangan dan 7 Gampong tidak rawan pangan dan berkecukupan untuk memenuhi pangan dalam kehidupannya;
3. Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, sedang berupaya maksimal dalam penanganan rawan pangan agar secara keseluruhan gampong mampu memenuhi stok pangan dalam tahun berjalan;

3.4 Sumber Data

Sumber data penelitian ini peneliti menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat memanfaatkan efisien waktu. Untuk memperoleh sumber data yang berkaitan dengan yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari objek penelitian atau sumber utama yang diperoleh secara langsung dari tempat lokasi penelitian melalui instrument observasi dan wawancara.⁴⁵⁾ Sebagaimana pendapat Moleong menyebutkan bahwa “Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan seperti hasil wawancara, observasi yang biasa dilakukan oleh peneliti”.⁴⁶⁾
2. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya seperti dari sumber jurnal, buku dan dokumen dari pihak instansi terkait. Sebagaimana pendapat Sugiyono menyebutkan bahwa “Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data semisal lewat dokumen atau wawancara dengan individu dalam lingkungan tempat

⁴⁵⁾ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung, Alfabeta, 2015), Hal.187.

⁴⁶⁾ Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Hal 157.

penelitian maupun orang lain yang dianggap sapat memberikan informasi bagi peneliti”.⁴⁷⁾

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih peneliti dalam upaya memperoleh bahan dan data-data penelitian lapangan yang dilakukan secara sengaja, sebagaimana pendapat Moleong menyebutkan bahwa “Penentuan informan memiliki beberapa kriteria yaitu harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau tentang peristiwa yang terjadi”.⁴⁸⁾

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) Orang yang terdiri atas :

Tabel 3.3
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah org
1	Sekretaris Dinas Pangan	1 (satu) Orang
2	Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1 (satu) Orang
3	Kabid distribusi, Informasi dan Cadangan Pangan	1 (satu) Orang
4	Ketua Lumbung Pangan Masyarakat	2 (dua) Orang
Jumlah		5 (lima) Orang

Sumber : Data Diolah Tahun 2021

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui:

⁴⁷⁾ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal. 308.

⁴⁸⁾ Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Hal. 90.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan, sebagaimana pandangan Sutrisno Hadi dalam Sugiyono menyebutkan bahwa “Observasi langsung semacam ini dilaksanakan oleh peneliti dengan cara formal maupun informal untuk mengamati berbagai kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, bagaimana menyelesaikannya, dokumen-dokumen apa yang mereka jadikan pedoman dan blanko-blanko apa yang mereka isi”.⁴⁹⁾

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan, sehingga sebagaimana pendapat Sutopo menyebutkan bahwa “Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara si pencari informasi dengan sumber informasi”.⁵⁰⁾

3. Analisa Dokumen

Analisa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seorang. Hal ini sebagaimana Sugiyono menyebutkan bahwa “Dokumen yang berbentuk

⁴⁹⁾ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 145.

⁵⁰⁾ Sutopo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal.74.

karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif'.⁵¹⁾

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data-data yang telah terkumpul dengan menggunakan analisis deskriptif, sebagaimana pandangan Moleong menyebutkan "Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja".⁵²⁾

Selanjutnya Miles dan Huberman dalam Sugiyono juga menyebutkan sebagai berikut:

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistimatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sentesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵³⁾

Sebagai penegasan sebagaimana menurut Miles dan Humberman dalam Saldana menyebutkan bahwa "Di dalam analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) alur

⁵¹⁾ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal.240.

⁵²⁾ Moleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), Hal 280.

⁵³⁾ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal 337.

kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktifitas dalam aktifitas data yaitu data *condensation*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*".⁵⁴⁾

1. *Condensasi data (data condensation)*, merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengamstrakan, data atau mentransportasikan data yang mendekati keseluruhan bagian data catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris lainnya;
2. *Penyajian data (data Display)*, penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman;
3. *Penarikan kesimpulan (conclusion drawing)*, kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, *configurasi-conritigurasi* yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan "Final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi data.

⁵⁴⁾ Saldana, Humberman dan Miles, *Analisis data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), Hal 31-33.

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini uji keabsahan data melalui uji kredibilitas (*credibility*). *Credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam teknik pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara yaitu sebagai berikut :⁵⁵⁾

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti perlu memperpanjang pengamatannya karena jika hanya sekali datang ke lokasi penelitian akan sulit mendapatkan *link* atau *chemistry* dengan para partisipan. Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data.

2. Ketekunan Pengamatan

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus mengumpulkan data yang benar, aktual dan lengkap. Peneliti harus menunjukkan kegigihannya dalam memperoleh data yang sudah ada untuk memperdalamnya dan hal yang belum ada terus diupayakan keberadaannya. Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan dan kegigihan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

3. Triangulasi

Pengecekan dengan cara memeriksa ulang data. Pemeriksaan ulang ini dilakukan sebelum atau sesudah data dianalisis. Pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan

⁵⁵⁾ Wijaya, Hengki & Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), Hal. 134.

akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan 3 (tiga) strategi, yaitu sebagai berikut :

1) Triangulasi Sumber

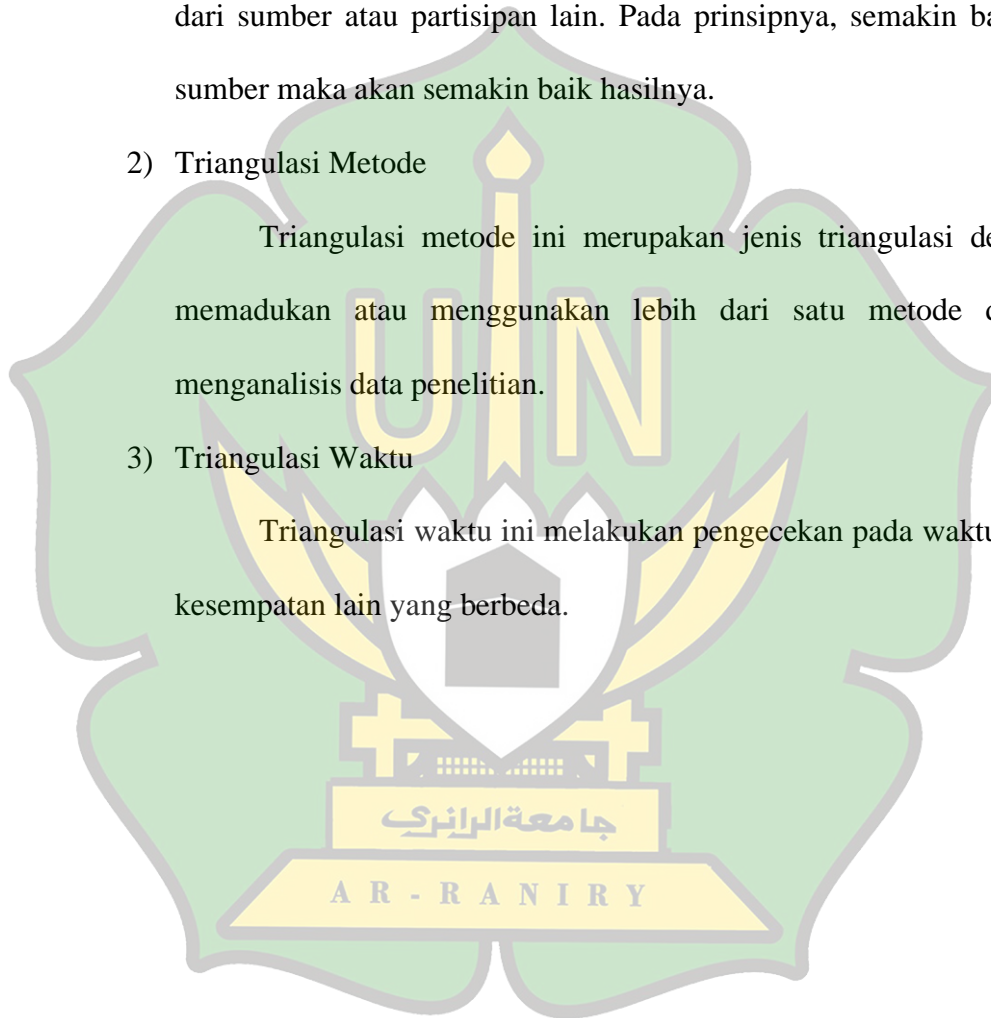
Peneliti mencari informasi lain tentang topik yang dikajinya dari sumber atau partisipan lain. Pada prinsipnya, semakin banyak sumber maka akan semakin baik hasilnya.

2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode ini merupakan jenis triangulasi dengan memadukan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data penelitian.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ini melakukan pengecekan pada waktu atau kesempatan lain yang berbeda.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar



Gambar 4.1 Kantor Dinas Pangan
Sumber: Dinas Pangan 2022

Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, Dinas Pangan adalah Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur

pelaksana urusan pemerintahan kabupaten di bidang pangan. Susunan organisasi

Dinas Pangan terdiri dari ;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- d. Bidang Distribusi, Informasi, dan Cadangan Pangan
- e. Bidang Kelembangan dan Keamanan Pangan
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 4.1
Jumlah Pegawai Per Jenis Kelamin

No	Nama Bidang/Bagian	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas Pangan	1	-	1
2	Sekretaris Dinas Pangan	3	1	4
3	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	4	1	5
4	Bidang Distribusi, Informasi dan Cadangan Pangan	2	2	4
5	Bidang Kelembagaan dan Keamanan Pangan	1	4	5
6	Kelompok Jabatan Fungsional	4	6	10

Sumber : Data Dinas Pangan 2022

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai Petingkat Pendidikan

No	Pegawai Per Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SLTP	-
2	SLTA	2
3	D-III	2
4	D-IV	-
5	S-1	21
6	S-2	4

Sumber : Data Dinas Pangan 2022

Tabel 4.3
Jumlah Pegawai Per Golongan

No	Pegawai Per Golongan	Jumlah Pegawai
1	II/a	-
2	II/b	-
3	II/c	-
4	II/d	1
5	III/a	1
6	III/b	2
7	III/c	1
8	III/d	8
9	IV/a	4
10	IV/b	2
11	IV/c	-

Sumber : Data Dinas Pangan 2022

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2017 Dinas Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan kelembagaan dan agribisnis, sistem penyuluhan dan ketahanan pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pangan mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Pelaksanaan pengawasan urusan ketatausahaan dinas sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka kelancaran administrasi perkantoran;
- b. Pelaksanaan pengawasan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sesuai ketentuan dan kebutuhan agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran;
- c. Pelaksanaan pengawasan penyusunan kebijakan teknis pengkajian, pemantauan dan pengendalian di bidang pangan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

- d. Pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- e. Pengoordinasian kegiatan pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka pengembangan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan dan gizi, distribusi, informasi dan harga pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pengelolaan administrasi ketatausahaan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan kegiatan penyusunan program, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi dari bidang-bidang lainnya, yaitu :

- a. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap ketersediaan dan akses pangan, sumber daya pangan dan kerawanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyiapan ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- b. Pengoordinasian kegiatan analisis penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- d. Pelaksanaan evaluasi penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, infrastruktur pangan dan kerawanan pangan;
- f. Pengoordinasian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- g. Pengoordinasian kegiatan analisis penyusunan rencana penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
 - h. Pengoordinasian kegiatan penanganan kerawanan pangan;
 - i. Pelaksanaan evaluasi penyusunan analisis system kewaspadaan pangan dan gizi;
 - j. Pengoordinasian data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Bidang Distribusi, Informasi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan teknis terhadap distribusi pangan, informasi dan harga pasar serta cadangan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bidang Distribusi, Informasi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
- a. Pengoordinasian kegiatan distribusi pangan, informasi dan cadangan pangan;
 - b. Pengoordinasian penyiapan bahan analisis distribusi pangan;
 - c. Pengoordinasian penyusunan analisis dan rencana pelaksanaan di bidang distribusi pangan, informasi dan cadangan pangan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;

- e. Pengoordinasian penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, informasi, harga dan cadangan pangan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi rencana dan analisis pasokan dan harga pangan;
 - g. Pelaksanaan evaluasi penyusunan prognosa neraca pangan;
 - h. Pengoordinasian pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - i. Pengoordinasian informasi harga, ketersediaan, keanekaragaman, distribusi dan keamanan pangan pada masyarakat;
 - j. Pengoordinasian kegiatan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - k. Pengoordinasian pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - l. Pengelolaan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Kelembagaan dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan terhadap kelembagaan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kelembagaan dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan evaluasi penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan keamanan pangan;
- c. Pengembangan lembaga-lembaga masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan;
- d. Penyiapan sarana dan dukungan untuk menggerakkan lembaga-lembaga pangan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pendampingan di bidang kelembagaan pangan;
- f. Penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- g. Pelaksanaan evaluasi analisis penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- i. Pengoordinasian promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- j. Pelaksanaan evaluasi gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- k. Penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

- l. Penyiapan perhitungan angka konsumsi energi dan protein masyarakat;
 - m. Penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - n. Pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar yang beredar;
 - o. Penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD); dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

c. Visi Misi Dinas Pangan

a. Visi

Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui pemberdayaan lembaga ekonomi pangan masyarakat berbasis mukim dan gampong.

b. Misi

- 1) Pemberdayaan masyarakat secara proaktif dan aspiratif dalam pengelolaan lembaga ekonomi pangan masyarakat;
- 2) Penganekaragaman produk pangan berbasis sumber daya local;
- 3) Peningkatan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan masyarakat;
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan pengendalian terhadap harga, ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan masyarakat;

- 6) Peningkatan peran serta lembaga masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

4.1.2 Hasil Pengumpulan Data

1. Ketersediaan pangan untuk masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar

Pada dasarnya ketersediaan pangan pada suatu daerah dan/atau wilayah sebagai kondisi real tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri baik itu dari sumber hayati maupun sumber olahan sehingga dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat serta memenuhi standar kebutuhan bagi pertumbuhan dan kesehatan. Ada 2 (dua) dimensi yang diteliti oleh peneliti untuk melihat sejauh mana ketersediaan pangan untuk masyarakat Kota Jantho. Dimensi-dimensi tersebut yaitu ketersediaan pangan dan tambahan pangan.

1) Ketersediaan Pangan

a. Sumber Hayati

Sumber hayati diperoleh dari hasil pemanfaatan sumber daya alam yang dijadikan sebagai bahan pangan untuk keberlangsungan kehidupan manusia dalam mencapai kebutuhan pertumbuhan dan kesehatan. Pada indikator ini kita dapat melihat bahan pangan apa saja yang dihasilkan masyarakat Kota Jantho dari sumber daya alam atau sumber hayati yang dan dari mana hasil pendapatan sumber hayati tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.

Ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Jantho Baru bapak Ismadi menyampaikan dalam wawancara :

Sebagian dari masyarakat Gampong Jantho Baru mereka menghasilkan sumber bahan pangan hayati ini dari hasil produksi perkebunan sendiri. Bahan pangan yang dihasilkan seperti padi, jagung dan ubi. Tetapi yang menjadi bahan pangan pokok yang di konsumsi masyarakat disini adalah

beras, sedangkan bahan pangan lainnya hanya dijadikan sebagai makanan cemilan.⁵⁶⁾

Selanjutnya Ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Awek juga menyampaikan dalam wawancara dengan peneliti :

Di Gampong Awek masyarakat hanya menghasilkan produksi padi. Penghasilan padi disini pun hanya setahun sekali dapat memproduksi hasil masa panen, berbeda dengan gampong lainnya yang dapat memproduksi hasil panen setahun dua kali. Maka dari itu masyarakat disini harus bisa mengatur penggunaan hasil panen tersebut dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka waktu panen yang akan datang.⁵⁷⁾

Kesimpulan indikator: ketersediaan pangan yang di hasilkan dari sumber hayati oleh masyarakat Kota Jantho dalam memenuhi keberlangsungan kehidupannya untuk mencapai kebutuhan pertumbuhan dan produksi perkebunan. Namun kenyataannya produksi padi yang dihasilkan hanya satu kali masa panen, sehingga mengurangi ketersediaan pangan masyarakat Kota Jantho.

b. Sumber Olahan

Sumber olahan diperoleh dari hasil pemanfaatan sumber daya alam yang diolah dengan cara atau metode tertentu untuk dikonsumsi. Pada indikator ini kita dapat melihat bahan pangan apa saja yang dapat diolah oleh masyarakat untuk dapat dikonsumsi.

Ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Jantho Baru bapak Ismadi menyampaikan dalam wawancara :

Sebagian dari masyarakat Jantho Baru menjadikan ubi sebagai bahan pangan olahan berupa tape, keripik dan tepung tiwul untuk bahan pangan baik dikonsumsi sendiri maupun dijual sebagai sumber pendapatan bagi

⁵⁶⁾ Wawancara dengan Ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Jantho Baru (Ismadi) pada tanggal 4 Juni 2022 di Kediannya.

⁵⁷⁾ Wawancara dengan ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Awek (Syarifuddin) pada tanggal 7 Juni 2022 di Kediannya.

keluarganya. Sedangkan bahan pangan jagung diolah dengan menambahkan bahan pangan lainnya untuk dikonsumsi langsung serta sebagiannya dijual ke pasar.⁵⁸⁾

Selanjutnya ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Awek juga menyampaikan dalam wawancara “Dikarenakan Gampong Awek hanya menghasilkan produksi padi, maka tidak ada bahan pangan yang dapat diolah menjadi bahan pangan olahan lainnya”.⁵⁹⁾

Kesimpulan indikator: sumber olahan yang digunakan untuk bahan pangan olahan dari pemanfaatan sumber daya alam pada desa tersebut. Yang mana masyarakat menjadikan ubi dan jagung menjadi bahan pangan olahan untuk dikonsumsi sebagai cemilan maupun dijadikan sebagai hasil pendapatan lain.

Kesimpulan dimensi ketersediaan pangan: ketersediaan pangan untuk masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar masih belum tercukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan persediaan pangan dalam kurun waktu panjang. Hal ini disebabkan masyarakat Kota Jantho hanya dapat memproduksi masa panen padi setahun sekali. Ketersediaan pangan dapat diperoleh dari sumber hayati dan sumber olahan.

2) Tambahan Pangan

a. Bahan Baku Pangan

Bahan baku pangan digunakan sebagai bahan utama yang dipakai dalam kegiatan atau proses produksi pangan, yang dapat berupa bahan mentah, bahan

⁵⁸⁾ Wawancara dengan Ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Jantho Baru (Ismadi) pada tanggal 4 Juni 2022 di Kediannya.

⁵⁹⁾ Wawancara dengan ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Awek (Syarifuddin) pada tanggal 7 Juni 2022 di Kediannya.

setengah jadi, atau bahan jadi. Sedangkan bahan lainnya sebagai bahan yang tidak termasuk bahan baku maupun bahan tambahan pangan, seperti ragi, gula, garam dan lain-lain. Pada indikator ini kita melihat tambahan bahan baku pangan apa saja yang diperlukan masyarakat.

Berdasarkan dari wawancara Ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Jantho Baru bapak Ismadi menyampaikan “Untuk memenuhi tambahan bahan pangan yang umum dipakai oleh masyarakat Gampong Jantho Baru merupakan hasil dari industri, seperti gula, pewarna, penyedap rasa, garam, tepung ragi dan bahan lainnya”.⁶⁰⁾

Selanjutnya Ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Awek bapak syarifuddin juga menyampaikan “Bahan baku pangan yang sering digunakan sebagai bahan pelengkap kebutuhan konsumsi, berupa minyak makan, gula, garam, penyedap makanan dan lain-lain”.⁶¹⁾

Kesimpulan indikator: bahan baku pangan yang sering digunakan oleh masyarakat Kota Jantho berupa gula, garam, minyak dan lain-lain.

b. Proses Penyiapan Pangan

Dalam proses penyiapan pangan ini masyarakat Kota Jantho mempersiapkan bahan pangan apa saja yang akan digunakan untuk diolah menjadi produksi pangan berupa keripik, tape dan lain-lain. Maka dari itu pada indikator ini kita dapat melihat dari mana masyarakat dapat memperoleh bahan

⁶⁰⁾ Wawancara dengan Ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Jantho Baru (Ismadi) pada tanggal 4 Juni 2022 di Kediannya.

⁶¹⁾ Wawancara dengan ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Awek (Syarifuddin) pada tanggal 7 Juni 2022 di Kediannya.

baku pangan lainnya yang akan digunakan dalam proses penyiapan pangan untuk dijadikan produksi pangan olahan.

Ketua lumbung pangan masyarakat Gampong Jantho Baru bapak ismadi menyampaikan bahwa “Dalam pembuatan tape bahan yang diperlukan berupa singkong dan ragi tape. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari hasil panen masyarakat dan Pasar Kecamatan Kota Jantho”.⁶²⁾

Selanjutnya wawancara dengan Ketua lumbung pangan Gampong Awek bapak Syarifuddin menyampaikan bahwa:

“Tambahkan pangan masyarakat diperoleh dari pasar Kecamatan Kota Jantho. Tambahkan pangan ini hanya sebagai pelengkap kebutuhan konsumsi saja, seperti masyarakat ingin membuat kue, maka masyarakat memerlukan tambahan pangan lain seperti tepung, gula, vanili dan lain-lain”.⁶³⁾

Kesimpulan indikator: dalam proses penyiapan pangan yang akan dijadikan sebagai produksi pangan, masyarakat dapat memperoleh bahan baku pangan tersebut dari pasar Kecamatan Kota Jantho.

Kesimpulan dimensi tambahan pangan: tambahan pangan masyarakat dapat memperoleh dari pasar Kecamatan Kota Jantho, bahan-bahan tersebut berupa gula, garam, minyak dan lain-lain.

2. Upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan terhadap kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar

Pada dasarnya kerawanan pangan pada suatu daerah dan/atau wilayah, masyarakat atau rumah tangga sebagai kondisi yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan

⁶²⁾ Wawancara dengan Ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Jantho Baru (Ismadi) pada tanggal 4 Juni 2022 di Kediannya.

⁶³⁾ Wawancara dengan ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Awek (Syarifuddin) pada tanggal 7 Juni 2022 di Kediannya.

keseimbangan gizi bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakatnya. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyebutkan bahwa “Terjadinya kerentanan kerawanan pangan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut.⁶⁴⁾

Tabel 4.4
Faktor Kerawanan Pangan dan Upaya Pemerintah Daerah

No	Faktor Kerawanan Pangan	Upaya Pemerintah Daerah
1	Ketersediaan pangan	Pemerintah memberikan fasilitas berupa : a. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) b. Pengadaan Gabah/Padi c. Modal awal atau dana
2	Akses terhadap pangan	Rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk menyebabkan akses terhadap pekerjaan dan pengelolaan sumberdaya menjadi rendah sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat. Rendahnya pendapatan menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah dan rendahnya daya beli menyebabkan pemenuhan kebutuhan dasar. Maka dari itu Pemerintah memberikan fasilitas berupa: a. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) b. Pengadaan Gabah/Padi c. Modal awal atau dana
3	Pemanfaatan pangan	Pemerintah memberikan sosialisasi terkait: a. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) b. Devirifikasi bahan pangan sesuai dengan kearifan Lokal

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar 2022

Maka dari itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi resiko kerawanan pangan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada

⁶⁴⁾ Wawancara dengan Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Mukhlis, SP) pada tanggal 7 Juni 2022 di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.

saat terjadinya kerawanan pangan, Pemerintah perlu melakukan beberapa upaya sebagaimana wawancara dengan Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar menyebutkan sebagai berikut:

Secara umum pemerintah merancang beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kerawanan pangan, melalui Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar. Upaya tersebut tidak dikhususkan hanya untuk Kecamatan Kota Jantho saja tetapi untuk seluruh Kabupaten Aceh Besar yang wilayah atau daerahnya yang rentan terhadap kerawanan pangan. Hal ini dikarenakan penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah atau daerah itu berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda.⁶⁵

Selanjutnya berdasarkan dokumen yang didapatkan peneliti dari Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, dapat dianalisa bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan kerawanan pangan Kabupaten Aceh Besar ialah sebagai berikut :

1. Program peningkatan dan pengembangan potensi desa:
 - a. Peningkatan fasilitas perdagangan. dari tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan
 - b. Fasilitasi dan sosialisasi penguatan Modal Usaha.
 - c. Pengembangan program penyediaan pangan murah (TTI, RPK, E-warung)
 - d. Penguatan lumbung pangan masyarakat desa
2. Mengadaptasi program pengentasan kemiskinan yang sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan intervensi gizi
3. Perubahan pola konsumsi pangan secara tidak langsung tergantung pada kemampuan daya beli masyarakat dan kestabilan harga pangan.
4. Melihat pola konsumsi pangan sumber karbohidrat (beras) maka Pemerintah harus melakukan reorientasi program yang berbasis kemandirian pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal yang menjadi pangan pokok masyarakat.

⁶⁵ Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pangan (T. Zahlul Fitri, SP., MP) pada tanggal 9 Juni 2022 di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.

5. Memfasilitasi diversifikasi usaha dan konsumsi pangan melalui pengembangan teknologi dan industri pengolahan komoditas unggulan lokal sesuai dengan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya.
6. Meningkatkan dan menjamin pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat miskin.
7. Meningkatkan manajemen program perbaikan gizi,
8. Peningkatan ruang fiskal untuk menaikkan alokasi dana sektor kesehatan dan penyesuaian biaya yang lebih baik bagi pembiayaan pelayanan kesehatan dasar untuk mendorong ekuitas.
9. Memadukan program perbaikan gizi dengan program Keluarga Berencana (KB) untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk.
10. Mengintegrasikan resiko dan realitas perubahan iklim ke dalam setiap program dan kebijakan pembangunan daerah untuk memastikan efektivitas dan memperkuat hubungan antara perencanaan dan tindakan di tingkat lokal.
11. Dukungan dari tingkat nasional dan provinsi, Pemerintah dapat melakukan sistem pangan terpadu, melalui:
 - a. Pendekatan multi dimensi; (i) meningkatkan produksi pangan primer; (ii) mengurangi kehilangan pasca panen dan konsumsi; dan (iii) Mengembangkan budaya konsumsi pangan lokal.
 - b. Pengembangan sistem pertanian ekologis multi komoditas, seperti Integrasi Tanaman Pangan-Hortikultura-Perkebunan-Ternak-Ikan-Perhutanan
 - c. Pengembangan rantai pasok pangan berbasis ilmu dan pengetahuan serta sensitif gizi.⁶⁶⁾

Selanjutnya untuk membahas sejauh mana upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan terhadap kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar peneliti menggunakan 2 (dua) dimensi yaitu kewilayahan dan pengendalian atau stabilitas.

1) Kewilayahan

a. Persediaan Pangan

Persediaan pangan sebagai indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah memberikan kontribusi persediaan kebutuhan pangan untuk penanganan kerawanan pangan masyarakat di Kecamatan Kota

⁶⁶⁾ Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.

Jantho. Persediaan pangan berasal dari semua sumber baik itu dari sumber hayati, sumber olahan, perdagangan, maupun bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Persediaan pangan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan bagi masyarakat di saat terjadinya rawan pangan. Penentuan daerah atau wilayah persediaan pangan ini dilakukan oleh pemerintah berdasarkan data ketersediaan dan kerawanan pangan, khususnya Kota Jantho pemerintah telah menetapkan persediaan pangan pada 2 (dua) gampong yaitu Gampong Jantho Baru dan Gampong Awek.

Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar melalui wawancara dengan peneliti menyebutkan sebagai berikut:

Persediaan pangan ini sangat penting untuk menjaga kecukupan kebutuhan pangan masyarakat pada saat kurangnya kebutuhan pokok akibat kurangnya hasil panen maupun sebab lainnya, dan kebutuhan persediaan pangan ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat akan tetapi dilakukan juga oleh pemerintah daerah.⁶⁷⁾

Adapun wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Distribusi, Informasi dan Cadangan Pangan menyebutkan sebagai berikut:

Persediaan pangan yang dilakukan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar untuk pemerintah sering disebut sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sedangkan persediaan untuk masyarakat yang difasilitasi oleh Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar sering disebut sebagai Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Fasilitas yang diberikan berupa pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), bantuan pengisian gabah dan bantuan dana modal awal. Fungsi adanya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) ini sebagai sarana penyimpanan stok persediaan pangan bagi masyarakat yang dikelola oleh kelompok tani dan juga untuk mengantisipasi apabila terjadi kekurangan bahan pangan di saat paceklik, (gagal panen) maupun akibat faktor – faktor lainnya seperti bencana alam, putusnya rantai pasok dan lain-lain.⁶⁸⁾

⁶⁷⁾ Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pangan (T. Zahlul Fitri, SP., MP) pada tanggal 9 Juni 2022 di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.

⁶⁸⁾ Wawancara dengan Kepala Bidang Distribusi, Informasi dan Cadangan Pangan (Ibu Idarlaila, SP., MP) pada tanggal 2 Juni 2022 di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.

Selanjutnya untuk menguatkan statement dari pihak Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Gampong Jantho Baru menyebutkan sebagai berikut:

Benar bahwasannya Gampong Jantho Baru menerima bantuan fasilitas dari pihak Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar untuk pengembangan cadangan pangan masyarakat. Bantuan yang terima berupa satu unit pembangunan lumbung pangan, 3000 Kilogram gabah, dan bantuan dana modal awal sebanyak Rp. 13.550.000,00.⁶⁹⁾

Selanjutnya ketua Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Gampong Awek juga menyebutkan bahwa “Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar pernah memberikan fasilitas untuk pengembangan cadangan pangan masyarakat berupa satu unit pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) beserta pengisian bantuan gabah sebanyak 2000 kilogram gabah”.⁷⁰⁾

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar selain memberikan fasilitas kepada masyarakat Kota Jantho, juga melakukan sosialisasi mengenai bagaimana cara pengelolaan bantuan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat yang dilaksanakan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Distribusi, Informasi dan Cadangan Pangan dalam wawancara:

Setelah Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar memberikan fasilitas sarana dan prasana kepada masyarakat, Dinas juga melakukan sosialisasi terkait bagaimana cara pengembangan dan pengelolaan

⁶⁹⁾ Wawancara dengan Ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Jantho Baru (Ismadi) pada tanggal 4 Juni 2022 di Kediannya.

⁷⁰⁾ Wawancara dengan ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Awek (Syarifuddin) pada tanggal 7 Juni 2022 di Kediannya.

lumbung pangan masyarakat agar masyarakat dapat menjaga persediaan bahan pangan serta pihak Dinas juga melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) tersebut.⁷¹⁾

Ketua Lumbung Pangan di Gampong Jantho Baru juga menyebutkan dalam wawancara dengan peneliti sebagai penguat statement di atas yaitu sebagai berikut:

Bahwa setelah diberikan fasilitas sarana dan prasana Lumbung Pangan Masyarakat, Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar juga memberikan sosialisasi terkait pengelolaan lumbung pangan. Pihak Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar memberikan arahan bahwa fungsi adanya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) itu adalah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) ini memfasilitasi masyarakat apabila masyarakat mengalami gagal panen sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok, masyarakat dapat meminjam gabah kepada pihak Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dengan syarat hasil masa panen yang selanjutnya berhasil maka harus dikembalikan sebesar pinjaman. Sosialisasi ini dilakukan melalui musyawarah dusun.⁷²⁾

Selanjutnya ketua Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Gampong Awek dalam wawancara dengan peneliti menyebutkan sebagai berikut:

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar pernah melakukan sosialisasi terkait upaya pengembangan dan pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Ada beberapa materi sosialisasi yang disampaikan yaitu mengenai penyediaan stok cadangan pangan, simpan pinjam gabah, dan kapan saat perguliran gabah harus dilakukan.⁷³⁾

Adapun berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap persediaan pangan menunjukan sebagai berikut:

⁷¹⁾ Wawancara dengan Kepala Bidang Distribusi, Informasi dan Cadangan Pangan (Ibu Idarlaila, SP., MP) pada tanggal 2 Juni 2022 di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.

⁷²⁾ Wawancara dengan Ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Jantho Baru (Ismadi) pada tanggal 4 Juni 2022 di Kediannya.

⁷³⁾ Wawancara dengan ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Awek (Syarifuddin) pada tanggal 7 Juni 2022 di Kediannya.

Salah satu gampong yang telah menerima bantuan Pemerintah belum menunjukkan perubahan yang signifikan kearah keluarnya dari status wilayah rawan pangan sebagaimana tertera dalam laporan peta ketersediaan dan kerawanan pangan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar tahun 2021.⁷⁴⁾

Demikian pula hal ini disebabkan pengelolaan bantuan yang diberikan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar kepada kelompok lumbung pangan masyarakat kurang optimal sebagaimana yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari data pelaporan kegiatan pelaksanaan lumbung pangan masyarakat yang peneliti peroleh di lapangan.

Kesimpulan indikator: Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar telah melakukan upaya terhadap persediaan pangan untuk masyarakat Kota Jantho dengan memberikan fasilitas yaitu pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebagai persediaan pangan dan juga melakukan sosialisasi pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat. Namun pada kenyataannya masih ada salah satu gampong masih dikatakan daerah atau wilayah rawan pangan, disebabkan kurang optimalnya kelompok lumbung pangan terhadap pengelolaan bantuan yang diberikan.

b. Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan dapat diukur dengan sejumlah makanan atau minuman yang di konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keseimbangan gizi. Perubahan pola konsumsi pangan yang berlebih dapat mempegaruhi pada keseimbangan gizi, kesehatan, tumbuh kembangnya suatu masyarakat serta

⁷⁴⁾ Observasi, di Gampong Awek, 7 Juni 2022.

dapat mengalami daerah rawan pangan. Oleh demikian pemerintah penting untuk memperhatikan pola konsumsi pangan masyarakat, penyediaan bahan pangan masyarakat serta mengembangkan pengetahuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Aceh dalam wawancara dengan peneliti menyebutkan sebagai berikut:

Pada umumnya beras merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi masyarakat Kota Jantho untuk memenuhi keseimbangan gizi. Kabupaten Aceh Besar memiliki kedudukan indeks ketahanan pangan tertinggi di Provinsi Aceh, indeks ketahanan pangan Kabupaten Aceh Besar 83,99 sedangkan konsumsi rata-rata perkapita pertahun 84 kilogram dengan jumlah penduduk yang mencapai 405,535 jiwa. Apabila pola konsumsi mengalami peningkatan sehingga persediaan pangan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, hal ini akan mengakibatkan terjadinya kerawanan pangan. Dengan demikian alangkah baiknya masyarakat Kota Jantho tidak hanya fokus mengkonsumsi bahan pangan pokok beras saja tetapi masyarakat dapat memanfaatkan keanekaragaman konsumsi pangan yang ada, seperti ubi jalar, jagung dan lain-lain.⁷⁵⁾

Hal ini juga disampaikan kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan dalam wawancara dengan peneliti menyebutkan sebagai berikut:

Akan sangat sulit jika masyarakat Kota Jantho hanya fokus pada konsumsi bahan pangan beras saja untuk memenuhi keseimbangan gizinya, selama masih adanya persediaan gabah atau padi hal tersebut tidak dipermasalahkan, ini yang akan menjadi permasalahan jika sewaktu-waktu tidak ada penghasilan atau persediaan produksi gabah atau padi apakah masyarakat tidak akan memenuhi keseimbangan gizinya. Dengan demikian agar masyarakat dapat memenuhi keseimbangan gizinya walaupun tidak ada beras sebagai bahan pangan pokok, masyarakat dapat memanfaatkan kearifan lokal yang ada sebagai bahan pangan pengganti beras yang diolah menjadi bahan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.⁷⁶⁾

⁷⁵⁾ Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pangan (T. Zahlul Fitri, SP., MP) pada tanggal 9 Juni 2022 di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.

⁷⁶⁾ Wawancara dengan Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Mukhlis, SP) pada tanggal 7 Juni 2022 di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.

Selanjutnya kepala Bidang Distribusi, Informasi dan Cadangan Pangan menyebutkan dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar mengupayakan agar masyarakat Kota Jantho tidak hanya fokus pada beras tetapi juga dapat memanfaatkan keanekaragaman pangan lainnya menjadi menu pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi diversifikasi bahan pangan menjadi bahan pangan lainnya sebagai bahan pengganti bahan pangan pokok beras. Hal ini dilakukan melalui kegiatan gerakan sadar pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Sedangkan untuk masyarakat langsung pihak Dinas Pangan Kabupaten Aceh besar tidak terjun langsung ke desa-desa untuk memberikan pembinaan terkait diversifikasi bahan pangan.⁷⁷⁾

Ketua Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Gampong Jantho Baru dalam wawancara dengan peneliti menyebutkan sebagai berikut:

Di Gampong Jantho Baru rata-rata masyarakat mengkonsumsi padi atau beras hanya 19 (sembilan belas) persen dari hasil yang di produksi, selebihnya digunakan untuk benih, cadangan konsumsi, dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Sedangkan untuk sosialisasi yang dilakukan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar pernah dilakukan di Dinas itu sendiri, untuk diberikan sosialisasi secara langsung ke desa-desa belum pernah”.⁷⁸⁾

Ketua Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) gampong Awek dalam wawancara dengan peneliti juga menyebutkan sebagai berikut:

Sejauh ini Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar belum pernah melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan keanekaragaman pangan, hanya saja dari pihak Dinas melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan adanya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Mungkin jika pihak Dinas melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan keanekaragaman pangan kepada masyarakat, masyarakat dapat mengolah bahan pangan lain menjadi bahan konsumsi pangan, sehingga masyarakat tidak hanya fokus pada konsumsi beras saja, walaupun pada

⁷⁷⁾ Wawancara dengan Kepala Bidang Distribusi, Informasi dan Cadangan Pangan (Ibu Idarlaila, SP., MP) pada tanggal 2 Juni 2022 di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.

⁷⁸⁾ Wawancara dengan Ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Jantho Baru (Ismadi) pada tanggal 4 Juni 2022 di Kediannya.

mayoritasnya bahan pangan yang sering dikonsumsi masyarakat yaitu beras.⁷⁹⁾

Adapun berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap konsumsi pangan menunjukkan sebagai berikut:

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar telah memberikan sosialisasi diversifikasi bahan pangan menjadi bahan pangan lainnya melalui kegiatan gerakan sadar pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) pada tingkat kecamatan yang dilakukan di Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, akan tetapi masyarakat tidak ada yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.⁸⁰⁾

Kesimpulan Indikator: Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar telah melakukan upaya terhadap konsumsi pangan untuk masyarakat Kota Jantho pada saat kekurangannya bahan pangan pokok. Namun masyarakat tidak ada yang ikut berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut.

Kesimpulan dimensi kewilayahan: pada dimensi kewilayahan ini upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan terhadap kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar masih belum efektif, hal ini disebabkan oleh pertama kurang optimalnya kelompok lumbung pangan terhadap pengelolaan bantuan yang diberikan. Kedua, kurangnya partisipasi masyarakat Kota Jantho dalam mengikuti sosialisasi diversifikasi bahan pangan menjadi bahan pangan lainnya melalui kegiatan gerakan sadar pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.

⁷⁹⁾ Wawancara dengan ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Awek (Syarifuddin) pada tanggal 7 Juni 2022 di Kediannya.

⁸⁰⁾ Observasi, di Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, 2 Juni 2022.

2) Pengendalian atau stabilitasi

a. Harga Pangan

Harga pangan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi mampu tidaknya masyarakat mendapatkan bahan pangan. Fluktuasi harga pangan dipengaruhi oleh persediaan dan permintaan. Apabila persediaan bahan pangan yang sedikit maka akan mengalami kenaikan harga pangan demikian pula sebaliknya. Stabilitas bahan pangan dan harga pangan pokok dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat kurang mampu serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap bahan pangan pokok. Pada indikator ini kita melihat upaya apa yang dilakukan Pemerintah dalam menjaga kestabilan harga pangan.

Kepala Bidang Distribusi, Informasi dan Cadangan Pangan melalui wawancara dengan peneliti menyebutkan bahwa “Pemerintah wajib untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan agar masyarakat mampu membeli kebutuhan bahan pangan sesuai dengan hasil pendapatannya. Jika harga bahan pangan mengalami kenaikan terus-menerus dapat mengakibatkan terjadinya kerawanan pangan”.⁸¹⁾

Kenaikan harga pangan biasa terjadi pada hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan hari besar lainnya. Maka dari itu pemerintah perlu melakukan beberapa upaya untuk menjaga kestabilan harga pangan yang tidak menentu. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Pangan menyebutkan sebagai berikut:

⁸¹⁾ Wawancara dengan Kepala Bidang Distribusi, Informasi dan Cadangan Pangan (Ibu Idarlaila, SP., MP) pada tanggal 2 Juni 2022 di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.

Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok melalui Dinas Pangan. Salah satunya adalah pengembangan kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) menjadi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan tambahan modal untuk pengadaan gabah untuk menjaga stabilitas harga gabah dan pengembangan kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) menjadi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dengan memberikan bantuan biaya operasional penggilingan gabah menjadi beras yang bekerja sama dengan Toko Tani Indonesia (TTI) untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok pangan. Dengan adanya kerja sama dengan Toko Tani Indonesia harga bahan pangan pokok tetap stabil.⁸²⁾

Kemudian Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan pangan juga menyebutkan bahwa “Adanya kerja sama antara Lumbung Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia ini dapat membantu perekonomian masyarakat dalam membeli bahan pokok pangan (beras) dengan harga yang terjangkau, meskipun harga bahan pokok pangan (beras) mengalami gejolak harga”.⁸³⁾

Selanjutnya untuk penguatan informasi yang disampaikan dari pihak Dinas Kabupaten Aceh Besar, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Gampong Jantho Baru menyebutkan sebagai berikut:

Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar telah memberikan bantuan dana modal lumbung pangan. Sehingga pada saat kondisi harga pangan yang tidak stabilpun kelompok lumbung pangan atau masyarakat dapat membeli atau menjual gabah kepada pihak lumbung masyarakat dengan harga sesuai kesepakatan bersama.⁸⁴⁾

Ketua Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Gampong Awek juga menyebutkan dalam wawancara dengan peneliti bahwa “Adanya lumbung

⁸²⁾ Wawancara Sekretaris Dinas Pangan (T. Zahlul Fitri, SP., MP) pada tanggal 9 Juni 2022 di Kantor Dinas Pangan.

⁸³⁾ Wawancara dengan Kepala Bidang Distribusi, Informasi dan Cadangan Pangan (Ibu Idarlaila, SP., MP) pada tanggal 2 Juni 2022 di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.

⁸⁴⁾ Wawancara dengan Ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Jantho Baru (Ismadi) pada tanggal 4 Juni 2022 di Kediannya.

pangan masyarakat ini juga dapat menjaga kestabilan harga bahan pangan. Yang mana masyarakat dapat menjual hasil produksinya dengan harga yang terjangkau walaupun pada saat terjadinya kenaikan harga bahan pangan”.⁸⁵⁾

Adapun berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap harga pangan menunjukkan sebagai berikut:

Kelompok lumbung pangan masyarakat Kota Jantho belum bisa mengembangkan lumbung pangannya menjadi pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) sehingga tidak dapat memproduksi gabah menjadi beras. Seharusnya kelompok dapat mengembangkan lumbung pangan tersebut agar dapat bekerja sama dengan toko tani dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok.⁸⁶⁾

Kesimpulan Indikator: upaya Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar telah dilakukan dalam menjaga kestabilan harga bahan pangan agar masyarakat dapat menjaga ketersediaan bahan pangan untuk melangsungkan kebutuhan bahan pangannya. Upaya yang dilakukan Pihak Dinas adalah memberikan pembinaan kepada kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) menjadi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan memberikan tambahan modal dan tambahan pengadaan gabah untuk memperluas jangkauan kegiatan dan memperbanyak anggota kelompok hingga kelompok menjadi mandiri untuk menjaga kestabilan harga gabah pangan atau harga bahan pangan.

b. Keadaan Darurat

Keadaan darurat sebagai indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya dalam mengatasi keadaan darurat di Kota Jantho. Keadaan darurat ini merupakan suatu keadaan krisis yang tidak

⁸⁵⁾ Wawancara dengan ketua Lumbung Pangan Masyarakat Gampong Awek (Syarifuddin) pada tanggal 7 Juni 2022 di Kediannya.

⁸⁶⁾ Observasi, Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), 18 Juni 2022.

menentu sehingga mengancam kehidupan sosial masyarakat atau kerawanan pangan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat dari pihak pemerintah.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melalui wawancara dengan peneliti menyebutkan sebagai berikut:

Keadaan darurat disuatu wilayah atau daerah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu bencana sosial, bencana alam, kekurangan bahan pangan, gejolak harga pangan dan lain-lain. Dalam mengatasi keadaan darurat tersebut Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar akan melakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah yang telah pemerintah cadangkan. Cadangan pangan pemerintah ini disediakan oleh pemerintah, jenis cadangan yang disediakan sesuai dengan pola konsumsi pangan masyarakat yaitu beras dan besar jumlahnya cadangan pangan pemerintah juga disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan.⁸⁷⁾

Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Aceh dalam wawancara dengan peneliti menyebutkan sebagai berikut:

Untuk sejauh ini ada beberapa desa di Kota Jantho telah mengalami keadaan darurat (kerawanan pangan). Dan pihak Dinas Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan penanganan pertama yaitu dengan menyediakan lumbung pangan masyarakat, apabila lumbung pangan masyarakat tersebut sudah tidak dapat memenuhi ketersediaan dan keamanan pangan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk masyarakat setempat, maka pemerintah akan melakukan penyaluran bantuan bahan pangan melalui cadangan pangan pemerintah. Penyaluran cadangan pangan pemerintah ini memiliki prosedur kapan dan dimana pemerintah harus menyalurkan cadangan pangan tersebut. Prosedur dan mekanisme penyaluran cadangan pangan masyarakat terdapat pada Peraturan Bupati Aceh Besar Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah.⁸⁸⁾

Kesimpulan indikator: upaya Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar jika terjadinya keadaan darurat maka akan melakukan penyaluran bantuan bahan pangan yang telah disediakan oleh pemerintah melalui cadangan pangan

⁸⁷⁾ Wawancara dengan Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Mukhlis, SP) pada tanggal 7 Juni 2022 di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.

⁸⁸⁾ Wawancara Sekretaris Dinas Pangan (T. Zahlul Fitri, SP., MP) pada tanggal 9 Juni 2022 di Kantor Dinas Pangan.

pemerintah, penyaluran yang akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan dimensi pengendalian atau stabilitasi: pada dimensi pengendalian atau stabilitasi ini upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan terhadap kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar telah efektif sesuai dengan apa yang diharapkan.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Ketersediaan pangan untuk masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar

a. Ketersediaan Pangan

Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu daerah yang menghasilkan pertanian tanaman pangan. Adapun jenis tanaman pangan yang sering dihasilkan petani masyarakat Kota Jantho berupa padi, jagung dan ubi.

Tanaman pangan yang dihasilkan bermanfaat sebagai pemasokan kebutuhan industri, ketersediaan pangan dan dapat memenuhi kebutuhan pokok utama dalam rumah tangga serta dapat menjaga ketahanan pangan masyarakat. Akan tetapi masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar hanya dapat memproduksi padi setahun sekali, hal ini disebabkan tidak adanya tadah hujan pada sawah tersebut. Produksi padi yang dihasilkan masyarakat sangat mempengaruhi ketersediaan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan persediaan pangan dalam kurun waktu panjang.

Pangan digunakan untuk kebutuhan dasar manusia dalam memenuhi keseimbangan gizinya seperti karbohidrat, protein, air, lemak, mineral dan vitamin. Pangan yang dikonsumsi masyarakat Kota Jantho dapat diperoleh baik itu dari sumber hayati maupun sumber olahan, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 pasal 1 (6) tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang mengamanatkan sebagai berikut:

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.⁸⁹⁾

Jika masyarakat mengalami keadaan yang mana masyarakat Kota Jantho tidak dapat memenuhi kebutuhan fisiologinya baik itu disebabkan adanya bencana alam, bencana sosial dan lainnya yang mengakibatkan putusnya akses terhadap pemasokan bahan pangan, maka masyarakat Kota Jantho dapat memanfaatkan ketersediaan pangan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Maka dari itu menjaga ketersediaan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar menjadi faktor yang penting dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta menjaga ketahanan pangan sehingga masyarakat Kota Jantho tetap dapat memenuhi bahan pangan, baik jumlah

⁸⁹⁾ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Aceh Besar, pasal 1 (6).

maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau, hal ini sesuai dengan pendapat Purwaningsih sebagai berikut:

Adanya ketahanan pangan maka diharapkan Masyarakat dapat mewujudkan kemandirian pangan, dimana arti kemandirian pangan itu sendiri Menurut UU RI No. 18 Tahun 2012 adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.⁹⁰⁾

Temuan: masyarakat Kota Jantho sangat memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya. Dengan pemanfaatan sumber daya tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat menghasilkan pendapatan lainnya dengan membuat produksi pangan dengan mengolah bahan pangan tersebut.

b. Tambahan Pangan

Tambahan pangan berfungsi sebagai bahan yang digunakan untuk mempegaruhi sifat atau bentuk dari bahan pangan sebelumnya. Bahan tambahan pangan yang secara alami bukan bagian dari bahan baku pangan, seperti bahan pewarna, pengawet, penyebab rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental. Contohnya dalam pembuatan tape masyarakat Kota Jantho menggunakan ragi tape agar pangan ubi dapat di fermentasikan, sehingga rasa dari ubi tersebut telah berubah dari sifat dasarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 pasal 1(1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik

⁹⁰⁾ Purwaningsih, Y. E, Ketahanan Pangan : Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol.9, No.1, 2008, Hal.3.

Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa “Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk memengaruhi sifat atau bentuk pangan”.⁹¹⁾

Dalam penggunaan bahan tambahan pangan adanya takaran yang harus digunakan sesuai aturan agar hal tersebut tersebut tetap aman dikonsumsi oleh masyarakat serta dapat memberikan manfaat. Namun juga sebaliknya jika penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak tepat atau melebihi takaran yang aman maka akan dapat menyebabkan terganggunya kesehatan bagi yang mengkonsumsinya.

Ketersediaan pangan tambahan pangan dapat diukur dengan keterjangkauan akses pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Jantho dalam menjaga ketahanan pangan. Maka keterjangkauan masyarakat dalam memenuhi bahan tambahan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh besar dapat diperoleh dari pasar Kecamatan kota Jantho.

Temuan: dalam memenuhi kebutuhan tambahan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dapat memperoleh tambahan pangan di pasar Kecamatan Kota Jantho. Namun pada Gampong juga tersedia toko kelontong masyarakat tetapi tidak semua tambahan pangan dapat dijual, hanya saja sebagian dari tambahan pangan.

⁹¹⁾ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan, pasal 1(1).

4.2.2 Upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan terhadap kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar

a. Kewilayahan

Penempatan kewilayahan rawan pangan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan beberapa indikator yang telah ditetapkan.

Pada daerah yang rawan pangan di Kota Jantho pertumbuhan ekonominya belum berlangsung dengan baik, sedangkan Pemerintah Daerah telah berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan berupa pembangunan lumbung pangan, pengadaan gabah dan modal awal. Hal ini digunakan untuk meningkatkan persediaan pangan masyarakat Kota Jantho dalam menanggulangi kekurangan pangan yang diakibatkan gagal panen ataupun oleh sebab lainnya. Akan tetapi masih salah satu gampong di Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar masih kurang optimal dalam pengelolaan bantuan yang diberikan, sehingga persediaan pangan dan konsumsi pangan di gampong tersebut sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya persediaan pangan masyarakat Kota Jantho.

Adapun wilayah di kota Jantho yang tersedia lumbung pangan atau tempat persediaan pangan yang digunakan untuk kelompok dan masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5
Gampong Yang Mempunyai Lumbung Pangan Masyarakat

No	Nama Gampong	Lumbung Pangan
1	Suka Tani	-
2	Bueng	-
3	Jalin	-
4	Data Cut	-
5	Teureubeh	-
6	Jantho Baru	Ada
7	Aweek	Ada
8	Cucum	-
9	Bukit Meusara	-
10	Barueh	-
11	Jantho	-
12	Jantho Makmur	-
13	Weu	-

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar 2022

Wilayah-wilayah yang mempunyai lumbung pangan masyarakat tersebut dapat memanfaatkan peluang yang diberikan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok dan masyarakatnya, sedangkan wilayah-wilayah tidak mempunyai lumbung pangan masyarakat harus berusaha secara mandiri untuk menyediakan persediaan pangan.

Selain itu Pemerintah Daerah juga telah menyelenggarakan sosialisasi terkait diversifikasi bahan pangan menjadi bahan pangan lainnya, hal ini bertujuan untuk masyarakat agar dapat mengelola bahan pangan yang ada sesuai dengan pendapatan sumber pangan yang dijadikan sebagai bahan pengganti pokok pangan (beras) untuk dikonsumsi masyarakat pada saat kekurangan bahan pokok pangan dalam memenuhi kebutuhan pertumbuhannya. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan gerakan sadar pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang

diselenggarakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan terhadap kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, hal ini sesuai dengan pasal 12 dan pasal 59 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang mengamatkan bahwa:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung Jawab atas Ketersediaan pangan dan pasal 59 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Temuan: kurang aktifnya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) ini disebabkan oleh kurang optimalnya kelompok lumbung pangan dalam pengelolaan bantuan yang telah diberikan.

b. Pengendalian/Stabilitas

Pada dasarnya ketidakstabilan harga bahan pangan disebabkan oleh persediaan dan permintaan. Apabila persediaan bahan pangan berkurang

sedangkan permintaan tinggi maka akan terjadinya kenaikan harga pangan begitu juga sebaliknya apabila ketersediaan pangan seimbang antar permintaan dan persediaan maka harga pangan akan tetap stabil. Ketidakstabilan ini biasanya terjadi menjelang hari-hari besar keagamaan nasional.

Tingginya harga bahan pangan dapat memengaruhi daya beli masyarakat menjadi rendah terutama masyarakat kurang mampu. Apabila hal tersebut terjadi masyarakat Kota Jantho tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menyebabkan terjadinya penurunan konsumsi gizi baik itu protein ataupun kalori serta juga dapat menyebabkan kerawanan pangan masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat prabowo yang menyebutkan bahwa “Pangan memiliki nilai-nilai yang penting karena jika terjadi peningkatan harga pangan akan berdampak pada penurunan konsumsi protein dan kalori”.⁹²⁾

Masyarakat dapat menjaga stabilitas harga bahan pangan dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar melalui lumbung pangan masyarakat serta bantuan berupa gabah atau padi dan modal awal untuk pembeli gabah kepada masyarakat. Dengan adanya bantuan yang diberikan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar masyarakat dapat mewujudkan kecukupan bahan pangan pokok yang aman dan bergizi, hal ini sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamankan

⁹²⁾ Prabowo, Eko, *Konsep & Aplikasi Keperawatan Jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika 2014). Hal.19.

bahwa “Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat”.⁹³⁾

Temuan: Lumbung Pangan Masyarakat sudah berjalan namun demikian lumbung pangan tersebut belum berkembang hanya sebatas mengelola bantuan dari Pemerintah.



13. ⁹³⁾ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, maka peneliti dapat menarik kesimpulan :

1. Rendahnya ketersediaan pangan untuk masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, sehingga belum tercukupinya ketersediaan pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan dalam kurun waktu panjang. Hal ini disebabkan oleh produksi padi yang dihasilkan masyarakat Kota Jantho hanya sekali dalam setahun.
2. Rendahnya upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan terhadap kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dalam menurunkan atau mengeluarkan status kerawanan pangan Kota Jantho menjadi wilayah ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Pertama, hal ini disebabkan kelompok lumbung pangan masyarakat belum optimal dalam memanfaatkan dan mengelola bantuan sarana dan prasarana berupa bantuan modal dan gudang Lumbung Pangan masyarakat yang diberikan Pemerintah. Kedua, belum efektifnya upaya Pemerintah Daerah dalam mengupayakan konsumsi pangan untuk masyarakat Kota Jantho pada saat kekurangannya bahan pangan

pokok, hal ini disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat Kota Jantho dalam mengikuti sosialisasi diversifikasi bahan pangan menjadi bahan pangan lainnya melalui kegiatan gerakan sadar pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar. Seharusnya Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar tidak hanya melakukan sosialisasi tingkat kecamatan atau kabupaten saja tetapi juga harus melakukan sosialisasi secara langsung ke desa-desa agar masyarakat mau berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut.

5.2 **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan baik dari segi pemanfaatan-pengelolaan bantuan sarana dan prasarana yang diberikan berupa pembangunan lumbung pangan masyarakat, modal awal dan pengadaan gabah yang diberikan pemerintah, serta adanya pengelolaan cadangan pangan dari pihak yang dilibatkan dalam pengurusan lumbung pangan masyarakat agar berperan aktif untuk memajukan kelompok lumbung pangan masyarakat.
2. Seharusnya Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar tidak hanya melakukan sosialisasi tingkat kecamatan atau kabupaten saja tetapi juga

harus melakukan sosialisasi secara langsung ke desa-desa agar masyarakat mau berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut.

3. Untuk Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) agar dapat meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat Kota Jantho dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Badan Ketahanan Pangan. 2019. *Bahan E-Learning Bidang Kerawanan Pangan*. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar. 2021. *Profil Pembangunan Aceh Besar*. BAPPEDA dan BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. 2021. *Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2021*. BPS.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Dr. Alexander Phuk Tjilen. S.E., M.Si. 2019. *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: NusaMedia.
- Dr.Syahrudin, S.E.,MsI. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: NusaMedia.
- Hanafie, R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : Penerbit Andi.
- Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan. 2018. *Panduan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat*. Jakarta.
- Moleong , J. Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Musfiqon. 2012. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Public Publisher.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Prabowo, Eko. 2014. *Konsep & Aplikasi Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Rahayu, Atikah, Fahrini Yulidasari & Andini Octaviana Putri. 2019. *Ekologi Pangan dan Gizi*. Yogyakarta: CV Mine.

Soejono, Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetanyo. 2012. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Grasindo.

Sohardono, Edi. 2012. *Teori Peran*. Jakarta: PT. Gramedia.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung, Alfabeta.

Sutopo. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Wibawa, Samodra. 2014. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.

Wijaya, Hengki & Helaluddin. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Saldana, Humberman dan Miles. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia

Jurnal atau Skripsi:

Purwaningsih, D. 2011. *Analisis Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah 2009*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Jurnal Ilmiah FE UNS Surakarta. Vol. 11, No.1.

Purwaningsih, Y. E. 2008. *Ketahanan Pangan : Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vol.9, No.1.

Rahmi, Hasanatul & Jumiati. 2020. *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat)*. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Volume 2 (1).

Syahida, Agung, Bayu. 2014. *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*. Jurnal Umrah 1(1).

Raif. 2019. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut*, Universitas Muhammadiyah Makasar. Skripsi.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Bupati Aceh Besar Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar*.

Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan. 2010. *Nomor: 43/Permentan/OT.140/7/2010 Tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 *Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 *Tentang Pangan*.

Wawancara:

T. Zahlul Fitri, SP., MT., Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, Wawancara oleh peneliti di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, 9 Juni 2022.

Idarlaila, SP., MP., Kepala Bidang Distribusi, Informasi dan Cadangan Pangan di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, 2 Juni 2022.

Mukhlis, SP, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Wawancara oleh peneliti di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, 7 Juni 2022.

Ismadi, Ketua Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Gampong Jantho Baru, Wawancara oleh peneliti di kedimaannya, 4 Juni 2022.

Syarifuddin, ketua Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Gampong Aweek, Wawancara oleh peneliti di kedimaannya, 7 Juni 2022.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1059/Un.08/FISIPIKp.07.6/04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2008, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/RIKp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 06 April 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si. Sebagai pembimbing pertama
2. Afrizal, S.IP., M.IP. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : Nobila Saumy Arghniya
NIM : 180802012
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 April 2022


Rektor
Dekan
Ernita Dewi
Ernita Dewi

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1266/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar
2. Ketua Lumbung Pangan Masyarakat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NOBILA SAUMY ARGHNIYA / 180802012**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Bukit Meusara, Kec. Kota Jantho

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Mei 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 20 Desember
2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 3. Foto Dokumentasi

	<p>Wawancara dengan Bapak T. Zahlul Fitri, SP., MT., Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, 9 Juni 2022.</p>
	<p>Wawancara dengan Ibu Idarlaila, SP., MP., Kepala Bidang Distribusi, Informasi dan Cadangan Pangan di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, 2 Juni 2022.</p>
	<p>Wawancara dengan Bapak Mukhlis, SP, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, 7 Juni 2022.</p>

 A photograph showing a woman in a pink hijab and a man in a blue t-shirt sitting at a wooden table. They are both looking at papers on the table, engaged in an interview. The background is a plain green wall.	<p>Wawancara dengan Bapak Ismadi, Ketua Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Gampong Jantho Baru, di kedimaannya, 4 Juni 2022.</p>
 A photograph showing a woman in a black hijab and a man in a grey t-shirt sitting on a wooden bench. They are looking at papers together. The background shows a room with several large white sacks stacked on a shelf.	<p>Wawancara dengan Bapak Syarifuddin, ketua Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Gampong Aweek, di kedimaannya, 7 Juni 2022.</p>



Pembangunan
Lumbung Pangan
Masyarakat (LPM)
di Gampong
Aweek Kota
Jantho, 7 Juni 2022



Pembangunan
Lumbung Pangan
Masyarakat (LPM)
di Gampong
Jantho Baru, 4 Juni
2022.

Lampiran 4. Bukti Penerimaan Bantuan Dari Pemerintah

DAFTAR LOKASI PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT, RUMAH RICE MILLING UNIT,
LANTAI JEMUR DAN RICE MILLING UNIT DI KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Lokasi			Keterangan
	Nama Gapoktan	Kecamatan	Gampong	
1	Mandiri Pangan	Kota Jantho	Jantho Baru	1. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat.
2	Peubut Beurata	Ingin Jaya	Meunasah Deyah	2. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat
3	Assaadah	Ingin Jaya	Lubok Bate	3. Rumah Rice Milling Unit dan Rice Milling Unit.
4	Al Falah	Sukamakmur	Luthu Lamweu	4. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Rumah Rice milling Unit dan Lantai Jemur

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

Ir. FUADIAHKMAD
Pembina TK I
NIP: 19640904 200112 1 002

**Bantuan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
di Gampong Jantho Baru**

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PANGAN

Jl. Laksamana Malahayati No. 4 Telp.(0651) 3721213, e mail : dispan.acesar@gmail.com Kode Pos 23911 Kota Jantho

BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : /- /BAST/DISPAN/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : SUHAIMI, SP
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah, Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.
Alamat : Jl. Laksamana Malahayati No.4 Kota Jantho,
Bertindak untuk dan atas nama DINAS PANGAN PANGAN KABUPATEN ACEH BESAR Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.....
- Nama : NGATMIN
Jabatan : Ketua Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) MANDIRI PANGAN
Alamat : Gampong Jantho Baru Kecamatan Kota Jantho Kab. Aceh Besar,
Bertindak untuk dan atas nama Gapoktan LPM MANDIRI PANGAN Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.....

PIHAK PERTAMA ,sebagaimana dalam jabatan tersebut diatas ,telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** barang - barang sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) No.055/585.A/SPK/DISPAN/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 secara lengkap, baik dan utuh sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOL	Spesifikasi
1	Gabah / Padi	3.000 KG	- Kadar air 14 % - Kadar sampah 3 %
2	Karung kapasitas 50 Kg	50 Pcs	- Bahan plastik

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah,
(SUHAIMI, SP)
NIP.1972 1121 199403 1 007

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
LPM MANDIRI PANGAN
(NGATMIN)
Ketua

Mengetahui :
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN ACEH BESAR
IR. FUADIAHKMAD
Pembina TK I
Nip: 19640904 200112 1 002

Bantuan Pengadaan Gabah di Gampong Jantho Baru

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PANGAN

Jl. Laksamana Malahayati No. 4 Telp.(0651) 92685, e mail : bpkp.acesar@gmail.com Kode Pos 23911 Kota Jantho

BERITA ACARA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
NOMOR : /BAPHP/DISPAN/2018

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas Bulan November Tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SYARIFUDDIN
Jabatan : Ketua
Nama Badan Usaha : Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
Alamat : Gampong Awek Kecamatan Kota Jantho.
Yang selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Barang/ Jasa**

1. Nama : Abu Bakar, SP
Nip : 19630413 200112 1 008
2. Nama : Ir. Yusriani
Nip : 19650618 199403 2 006
3. Nama : Ir. Zailinawati Razali
Nip : 19651105 200504 2 003

Yang selanjutnya disebut sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Dalam jabatan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 114.D/SK/Dispans/2018 tanggal 27 Februari 2018.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan menyatakan telah memeriksa hasil pekerjaan, dari penyedia barang/ jasa pekerjaan sebagai berikut :

No	JenisBarang	Volume	Lokasi	Keterangan
1.	Pengadaan Gabah/ Padi pengisian Lumbung Pangan	2000 Kg	Gudang Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Gampong Awek Kecamatan Kota Jantho.	Kadaan baik dan cukup

Panitia pemeriksa hasil pekerjaan menyatakan telah menerima pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan baik dan cukup, dan siap pakal dengan spesifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat serta ditandatangani oleh masing masing pihak dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang Memeriksa
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN BARANG /JASA

1. Abu Bakar, SP
NIP. 19631403 2001121008 1.....
2. Ir. Yusriani
NIP. 19650618 199403 2 006 2.....
3. Ir. ZailinawatiRazali
NIP. 19651105 200504 2 003 3.....

Penyedia Barang/ Jasa
Ketub LPM
SYARIFUDDIN

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar
Selaku Pembaguna Anggaran

Bantuan Pengadaan Gabah di Gampong Aweek

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5. Draf Wawancara

Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar :

1. Program apa saja yang dicanangkan untuk penanganan kerawanan pangan di Kota Janto Kabupaten Aceh Besar?
2. Siapa yang memiliki kewenangan terhadap persediaan pangan untuk Masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana pola konsumsi pangan (beras) masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar?
4. Apa strategi Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar dalam menjaga kestabilan harga pangan?
5. Jika sewaktu-waktu terjadinya keadaan darurat di masyarakat Kota Jantho sehingga mengakibatkan ketersediaan pangan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya apa yang akan dilakukan Dinas Pangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ?

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan:

1. Bagaimana kriteria penentuan kewilayahan kerawanan pangan di Kota Jantho?
2. Bagaimana pola konsumsi pangan (beras) masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar?
3. Apa strategi Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar dalam menjaga kestabilan harga pangan?
4. Jika sewaktu-waktu terjadinya keadaan darurat di masyarakat Kota Jantho sehingga mengakibatkan ketersediaan pangan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya apa yang akan dilakukan Dinas Pangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ?

Kepala Bidang Distribusi, Informasi dan Cadangan Pangan:

1. Apakah Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar memfasilitasi masyarakat untuk pengembangan cadangan pangan masyarakat, baik itu sarana maupun prasana? Jika ada, fasilitas seperti apa! *(Hal ini berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 33 (2) tentang Pangan)*
2. Apakah Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan lumbung pangan ? jika ada, bentuk sosialisasi seperti apa ?
3. Apakah Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan keanekaragaman pangan berdasarkan kearifan lokal untuk diolah menjadi menu panngan lainnya yang dapat dikonsumsi masyarakat?
4. Apa strategi Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar dalam menjaga kestabilan harga pangan?

Ketua Lumbung Pangan Masyarakat:

1. Apakah masyarakat pernah menerima fasilitas dari Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar untuk pengembangan cadangan pangan, baik itu sarana maupun prasana? jika ada, fasilitas seperti apa?
2. Apakah pernah Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan lumbung pangan ? Jika ada, bentuk sosialisasi seperti apa?
3. Apakah pernah Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan keanekaragaman pangan berdasarkan kearifan lokal untuk diolah menjadi menu pangan lainnya yang dapat dikonsumsi masyarakat?
4. Apakah ada sumber pendapatan lain untuk ketersediaan pangan (terutama padi/beras) selain pendapatan di desa ini?
5. Adakah bahan pangan lain pengganti beras untuk dikonsumsi masyarakat ?
6. Darimana bahan pangan masyarakat di dapat, apakah dari sumber hayati ataupun sumber olahan?
7. (jika dijawab no.6) Sumber hayati apa yang sering dikonsumsi masyarakat selain beras sebagai bahan pokok Kota Jantho?
8. (jika dijawab no.6) sumber olahan apa yang disering dikonsumsi masyarakat ? dan dari mana bahan olahan lainnya di dapat ?
9. Apakah perlu tambahan pangan dan bahan lainnya untuk masyarakat Kota Jantho ? jika perlu, mengapa diperlukan tambahan pangan lain untuk masyarakat Kota Jantho ?
10. (Jika dijawab no.9) Darimana tambahan pangan dapat diperoleh masyarakat Kota Jantho?

